



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA



Kemenag
Berdampak



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA



BerAKHLAK²

SMART



Facebook & Youtube
Kemenag Kota Yogyakarta



Website
yogyakartakota.kemenag.go.id



X & Instagram
Kemenag_Jogja

15. 01. 2026





RENSTRA 2025-2029



ANDA MEMASUKI WILAYAH ZONA INTEGRITAS

**BEBAS DARI KORUPSI
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

**STOP
KORUPSI
& PUNGLI**

Kantor
Kementerian Agama
Kota Yogyakarta

**STOP
GRATIFIKASI
LIHAT LAWAN LAPORKAN**

© kemenag_kota_yogyakarta @humas_kemenagyogya 📺 kemenag kota yogyakarta 📺 kemenag kota yogya

Kantor Kementerian Agama
Kota Yogyakarta

MAKLUMAT PELAYANAN DENGAN INI KAMI MENYATAKAN

1. Siap melayani dengan SMART (Senyum, Mudah, Amanah, Ramah, Transparan)
2. Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan
3. Berpegang teguh pada standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan
4. Apabila tidak melaksanakan maklumat pelayanan, siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Kepala,

Nadhif



KATAPENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan manifestasi dari komitmen kami untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan kehidupan beragama di wilayah Kota Yogyakarta. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agama, dokumen ini menjadi peta jalan resmi yang tidak hanya menjembatani antara tantangan dan peluang di lapangan, tetapi juga memastikan setiap langkah kebijakan selaras dengan arah pembangunan nasional dan visi Kementerian Agama. Dokumen ini adalah janji kami kepada masyarakat untuk menghadirkan pelayanan keagamaan yang transformatif dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

Renstra 2025-2029, membawa visi “Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, selaras dengan visi Kementerian Agama, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran. Visi ini diwujudkan melalui tiga Misi utama: meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan, meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Fokus utama kami adalah lebih memperkuat moderasi beragama, menjamin hak beragama, dan memberikan layanan pendidikan yang unggul dan inklusif, untuk menjawab isu-isu strategis seperti intoleransi dan kesenjangan akses yang teridentifikasi dalam potensi dan permasalahan.

Kami berharap, Renstra 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, serta menjadi acuan bagi mitra kerja dan seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan pembangunan keagamaan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama semata,



melainkan hasil kolaborasi kolektif Mari kita songsong lima tahun ke depan dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, demi mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang religius, cerdas, dan harmonis, sejalan dengan cita-cita besar Indonesia Emas 2045 Terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak.

Kepala,

^

H. Ahmad Shidqi



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 513 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: B-117/SJ/BI1/OT011/08/2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Penyusunan Renstra Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1030);



9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1361 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2026-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk:
- 1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
 - 2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
 - 3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,

^

AHMAD SHIDQI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KEPUTUSAN KEPALA	iii
DAFTAR ISI	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Singkatan	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Kondisi Umum	2
1.1.1. Kondisi Umum Bidang Agama	5
1.1.2. Kondisi Umum Bidang Pendidikan	26
1.1.3. Kondisi Umum Tata Kelola	41
1.2. Potensi dan Permasalahan	54
1.2.1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah	54
1.2.2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	55
1.2.3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan	58
1.2.4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas	60
1.2.5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif	63
 BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	 66
2.1. Visi dan Misi	67
2.2. Tujuan	68
2.3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran kegiatan	69
2.4. Manajemen Resiko Sasaran Kegiatan	76
2.5. Dukungan Program Prioritas Menteri Agama	83
2.6. Rumusan Pengukuran / Metadata	89
 BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	 106
3.1. Target Kinerja	107
3.2. Kerangka Pendanaan	113
 BAB IV PENUTUP	 117
Lampiran	
- Matrik Target Renstra	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Statistik Pegawai berdasarkan unit Kerja Tahun 2025	5
Tabel 1.2	Data rumah ibadah di Kota Yogyakarta	14
Tabel 1.3	Data Dana Hibah APBD tahun 2020-2024	17
Tabel 1.4	Rekap Pendaftaran Calon Haji Kota Yogyakarta 2020-2024	22
Tabel 1.5	Penerima Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	23
Tabel 1.6	Data Tanah Wakaf tahun 2024	25
Tabel 1.7	Data LAZ Kota Yogyakarta Tahun 2024	29
Tabel 1.8	Inovasi Pendidik Merdeka	32
Tabel 1.9	Data Guru Sertifikasi tahun 2024	34
Tabel 1.10	Data Rekapitulasi Penerimaan TPG Madrasah & GPAI	34
Tabel 1.11	Data Akreditasi Madrasah Jenjang RA	36
Tabel 1.12	Data Akreditasi Madrasah Jenjang MI	37
Tabel 1.13	Data Akreditasi Madrasah Jenjang MTs	39
Tabel 1.14	Data Akreditasi Madrasah Jenjang MA	43
Tabel 1.15	Data Prestasi Menurut Tingkat Kejuaraan	44
Tabel 1.16	Data Inventaris Tanah yang Bersertipikat	47
Tabel 1.17	Data Nilai Kinerja Anggaran	48
Tabel 1.18	Data Studi Tiru	49
Tabel 1.19	Data Nilai IKPA tahun 2024	50
Tabel 1.20	Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Pertama Tahun 2020-2024	54
Tabel 1.21	Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Kedua Tahun 2020-2024	56
Tabel 1.22	Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Ketiga Tahun 2020-2024	58
Tabel 1.23	Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Keempat Tahun 2020-2024	61
Tabel 1.24	Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Kelima Tahun 2020-2024	63
Tabel 2.1	Identifikasi Risiko Sasaran Kinerja dan Perlakuannya 2020-2024	76
Tabel 2.2	Rumus Pengukuran Indikator Kinerja Saaran Kinerja	90
Tabel 3.1	Target Kinerja Renstra 2025-2029	107
Tabel 3.2	Indikasi Kebutuhan Pendanaan	113



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pelaksanaan CAT Penyuluh	6
Gambar 1.2 Pembinaan Kelompok Sasaran	7
Gambar 1.3 Pembinaan pada kelompok Bedukdinakota	8
Gambar 1.4 Penyerahan Penghargaan Penyuluh award	9
Gambar 1.5 Pembinaan Kelurahan rukun	9
Gambar 1.6 Pembinaan Kapung Rukun Beragama	10
Gambar 1.7 Pemberian Hadiah Lomba KUA	10
Gambar 1.8 Dialog Tokoh Lintas Agama	11
Gambar 1.9 Dialog Lintas Agama	12
Gambar 1.10 Siaran Keagamaan di Ruang Podcast	15
Gambar 1.11 Kegiatan Pembinaan Kepala Madrasah Diniyah	16
Gambar 1.12 Pemenang MTQ & STQ Kota Yogyakarta 2024	18
Gambar 1.13 Penyerahan Bantuan Sarana Prasarana Tempat Ibadah	18
Gambar 1.14 Pelaksanaan BRUS dan Bimbingan Caten	20
Gambar 1.15 Pentasyarufan Zakat Profesi & Tukin di Kota Yogyakarta	25
Gambar 1.16 Pembelajaran dengan pemanfaatan kurikulum Inovasi Marasah Aliyah	26
Gambar 1.17 Penerapan & Pemanfaatan TIK dlam pembelajaran	28
Gambar 1.18 Pelatihan pendidik dan Tenaga Kependidikan	29
Gambar 1.19 Penerapan Pendidikan yang Ramah, nyaman dan Menyenangkan	33
Gambar 1.20 Prestasi Guru dan Tenaga Kependidikan	35
Gambar 1.21 Kegiatan Pramuka	40
Gambar 1.22 Pelantikan Tim ZI dan Agen Perubahan	46
Gambar 1.23 Kondisi Perkantoran Sebelum dan sesudah Renovasi	50
Gambar 1.24 Penyampaian Informasi melalui Podcast	52

**DAFTAR SINGKATAN**

ASN	Aparatur Sipil Negara	Ponpes	Pondok Pesantren
AKG	Asesmen Kompetensi Guru	PPDB	Penerimaan Peserta Didik Baru
AKK	Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah	PPG	Pendidikan Profesi Guru
AKP	Asesmen Kompetensi Pengawas	PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
BOS	Bantuan Operasional Sekolah	PPPRA	Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil 'Alamin
BSNP	Badan Standar Nasional Pendidikan	PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
CaLK	Catatan Atas Laporan Keuangan	Renstra-KL	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
COVID-19	Corona, Virus, Disease-19	RKTM	Rencana Kerja Tahunan Madrasah
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	RKA-KL	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
EDM	Evaluasi Diri Madrasah	RHK	Rencana Hasil Kerja
eRKAM	Elektronik Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
GLM	Gerakan Literasi Madrasah	RPP	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
GTK	Guru dan Tenaga Kependidikan	SATKER	Satuan Kerja
GTT	Guru Tidak Tetap	SBK	Standart Biaya Keluaran
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat	SBKK	Standart Biaya Keluaran Khusus
IKPA	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	SD	Sekolah Dasar
IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	SIPKA	Sistem Informasi Performa Kementerian Agama
IPTEKs	Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni	SIM	Sistem Informasi Manajemen
KUA	Kantor Urusan Agama	SIMPEG	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Kanwil	Kantor Wilayah	SK	Sasaran Kegiatan



Kemenag	Kantor Kementerian Agama	SKP	Sasaran Kinerja Pegawai
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	SNP	Standar Nasional Pendidikan
MAN	Madrasah Aliyah	SO	Strength-Opportunities
MBM	Manajemen Berbasis Madrasah	SS	Sasaran Strategis
MIN	Madrasah Ibtidaiyah	ST	Strength-Threats
MTsN	Madrasah Tsanawiyah	SWOT	Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats
PAI - S	Negeri Pendidikan Agama Islam	TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
PAIF	Penyuluh Agama Islam Fungsional	TPG	Tunjangan Profesi Guru
Pdpontren	Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	TPM	Tim Pengembang
Dikmad	Pendidikan Madrasah	TPMM	Madrasah Tim Penjamin Mutu Madrasah
PKG	Penilaian Kometensi Guru	TPQ	Taman Pendidikan Qur'an
PMA	Peraturan Menteri Agama	WO	Weaknesses-Opportunities
PNS	Pegawai Negeri Sipil	WT	Weaknesses-Threats
POK	Petunjuk Operasional Kegiatan	ZI	Zona Integritas

BAB I

PENDAHULUAN





PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2024 menunjukkan dinamika yang kompleks, dengan tantangan dan peluang yang beragam dalam bidang keagamaan. Di satu sisi, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, isu-isu seperti intoleransi, radikalisme, dan kesenjangan akses terhadap layanan keagamaan berkualitas masih menjadi perhatian. Renstra ini dirancang untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, melalui program-program yang inovatif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2025-2029 ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang religius, cerdas, dan harmonis. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Kami berharap renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan keagamaan di Kota Yogyakarta, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PMA no 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, maka kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerja Kantor Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dalam pasal 6 bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta adalah Jalan Ki Mangun Sarkoro 43 A Yogyakarta.

2. Tugas

Pasal 7 menyatakan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

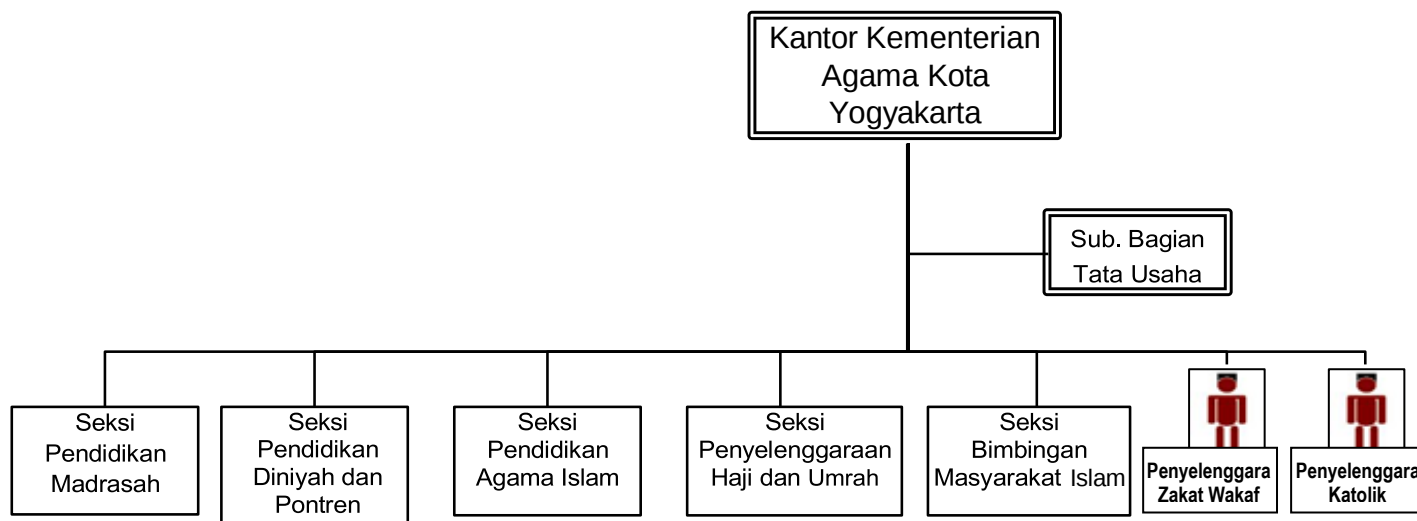
3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI no 19 tahun 2019, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menyelenggarakan fungsi yang dilaksanakan oleh seksi dan penyelenggara yang ada, sesuai dengan tipologinya Untuk Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
- b. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan

4. Struktur Organisasi dan Sumber daya manusia

BAGAN 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA



Sumber :

1. PMA RI no 19 Tahun 2019 tentang Ortaker Instansi Vertikal Kementerian Agama
2. PMA RI no 06 Tahun 2022 tentang Ortaker Instansi Vertikal Kementerian Agama
3. PMA RI no 34 Tahun 2024 tentang Ortaker Kantor Urusan Agama Kemantren

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dibantu unit kerja Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Penyelenggara Zakat Wakaf, Penyelenggara Katolik.

Dalam susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagaimana terurai di atas membawahi 14 KUA antara lain: KUA Kemantren Tegalrejo, Jetis, Gondokusuman, Danurejan, Gedongtengen, Ngampilan, Wirobrajan, Mantrijeron, Kraton, Gondomanan, Pakualaman, Mergangsan, Umbulharj, Kotagede.

Unit Satuan kerja yang berdiri sendiri tetapi masih dalam lingkup koordinasi adalah satuan kerja madrasah, ada 4 (empat) madrasah negeri antara lain : MAN 1 Yogyakarta, MAN 2 Yogyakarta, MTsN 1 Yogyakarta.

Sejak tahun 2020 Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang pengelolaan anggaran tergabung dengan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, sehingga bukan menjadi Satuan Kerja lagi yaitu MIN 1 Yogyakarta.

Klasifikasi sumber daya manusia yang mendukung tercapainya kinerja pada

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, berikut ini data Pegawai berdasarkan Unit kerja.

Tabel 1 1
Statistik Pegawai berdasar Unit Kerja Tahun 2025

No	Unit Kerja	Eselon/ Kepala	JFT	JFU	PPPK			Paruh Waktu	Jumlah
					JF	JP	JML		
1	Sub Bagian TU	2	24	19	14	3	17	3	65
2	Seksi Bimas Islam	1	4	1			0		6
3	Penyelenggara Zawa	1		3		1	1		5
4	Seksi PAIS	1		3			0		4
5	Seksi PD Pontren	1		3			0		4
6	Seksi Dikmad	1		2			0		3
7	Seksi PHU	1		3		2	2		6
8	Penyelenggara Katolik	1	2	2	3		3		8
9	Pengawas Sekolah/Madrasah		9				0		9
10	Penyuluh Agama Kristen, Hindu, Budha		4		10		10		14
11	MIN 1 Yogyakarta		24	3	6	3	9	1	37
12	MTsN 1 Yogyakarta	1	45	5	5	3	8	2	61
13	MAN 1 Yogyakarta	1	49	8	9	1	10	3	71
14	MAN 2 Yogyakarta	1	51	5	9	6	15	1	73
15	Guru Madrasah Swasta		18				0		18
16	Guru Pendidikan Agama		50				0		50
17	KUA		81	16	60	37	97	3	197
Total		12	361	73			172	13	631

Sumber: Data Simpeg Tahun 2025

1.1.1. Kondisi Umum Bidang Agama

Capain kinerja disusun untuk mengetahui pencapaian kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya. Berikut kami sampaikan berbagai upaya dalam memenuhi capaian kinerja di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 dalam bidang agama.

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas penyuluhan agama

Kualitas penyuluhan agama menunjukkan peningkatan yang signifikan, data tahun 2023 penyuluh agama Islam sejumlah 27 PNS dan 63 orang PAH

yang tersebar di 14 Kemantren Sedangkan Penyuluh Kristen sejumlah 3 orang, penyuluh Katolik sejumlah 2 orang, Hindu 1 orang dan Budha 1 orang. Dengan adanya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan penambahan melalui seleksi CPNS maka terdapat perubahan komposisi penyuluh Penyuluh Agama Islam terdiri dari 47 Penyuluh PNS/CPNS dan 59 penyuluh PPPK. Komposisi penyuluh Katolik adalah 2 orang penyuluh PNS dan 3 orang penyuluh P3K Penyuluh Hindu terdiri dari 1 orang penyuluh PNS dan 1 orang penyuluh P3K, Penyuluh Budha terdiri dari 1 orang penyuluh PNS dan 1 orang penyuluh P3K. Perubahan ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat status kepegawaian para penyuluh, memberikan mereka jaminan kerja yang lebih baik dan mendorong peningkatan kinerja kepenyuluhan.

Gambar 1.1 Pelaksanaan CAT Penyuluh



Peningkatan kualitas juga terlihat jelas pada aspek keterampilan dan penggunaan teknologi. Jika sebelumnya hanya 50% dari 27 penyuluh yang mampu menggunakan teknologi informasi (IT) untuk bimbingan, kini hampir seluruh penyuluh dapat memanfaatkan media sosial dalam kegiatan kepenyuluhan. Transformasi ini sangat krusial di era digital, memungkinkan pesan-pesan keagamaan menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

Sesuai Pedoman Penyuluh Agama Islam sebagaimana Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 504 Tahun 2022, menyebutkan bahwa Penyuluh Agama Islam Non PNS setidaknya memiliki 4 kelompok sasaran dengan bimbingan

penyuluhan minimal 8 kali tatap muka setiap bulan. Dengan adanya program-program mandatory Kementerian Agama yang mengharuskan setiap penyuluh untuk melakukan pemberdayaan kelompok sasaran.

Gambar 1.2: Pembinaan pada Kelompok Sasaran

Kegiatan-
kegiatan penyuluh
yang dilaksanakan
adalah pembinaan
masyarakat dalam
kelompok-kelompok
binaan, baik
dimasyarakat umum
maupun instansi
pemerintah/swasta.
Kelompok binaan
tersebut berbentuk
majelis taklim,
madrasah, TPA/TPQ,
sekolah minggu dan
kelompok-kelompok
pengajian lainnya.



Sebagai
program unggulan penyuluh Kementerian Agama Kota Yogyakarta, adalah pembinaan pada kelompok marjinal yaitu bimbingan edukasi keagamaan di Kementerian Agama Kota Yogyakarta (BEDUKDINAKOTA). Sasaran bimbingan tersebut adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), kenakalan remaja, nara pidana, pekerja seks komersial (PSK).

Gambar 1.3 Pembinaan pada Kelompok Bedukdinakota

- Pembinaan ODGJ dan Narapidana



- Pembinaan Kelompok Remaja



Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh tersebut selama kurun waktu tahun 2019-2024 dapat memperoleh beberapa prestasi dalam ajang PAI Award pada Tingkat Wilayah Kemenag DIY Penyuluh Agama Kota Yogyakarta yang memperoleh penghargaan pada Penyuluh Award adalah:

NO	TAHUN	JUARA	CABANG LOMBA	ATAS NAMA
1	2021	II	Penyuluh Teladan	Ismiyati, S Ag
2	2022		Penyuluh Teladan	Siti Daimah, S, Ag
3	2023	I	Pemberdayaan Ekonomi Umat	Dwi Muryanto, SP
4	2023	II	Peningkatan Literasi Al-Qur'an	Fahrur Rozi, S Thl
5	2023	II	Pelestarian Lingkungan	Mohammad Da'i, SAg, M S I
6	2023	III	Metode Penyuluhan Baru	Astuti, SHI
7	2023	III	Pendampingan Kelompok Rentan	Triyanto, SHI
8	2024		Penyuluh Teladan	Eko Agus Wibowo, S Sos

Gambar 1.4: Penyerahan Penghargaan Penyuluh aWard



Berdasarkan data Kemenag Kota Yogyakarta dalam angka 2024, pemeluk agama Islam sejumlah 347.514, Kristen 26.362, Katolik 39.840, Hindu 604, Budha 1.061, Khonghucu 31 jiwa. Sehingga rasio penyuluh agama Islam di Kota Yogyakarta sebesar 1:3,278. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan berhasil meningkatkan kualitas penyuluhan agama, baik dari segi kuantitas, status kepegawaian, maupun kapabilitas teknis.

2. *Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama*

Gambar 1.5: Pembinaan Kelurahan Rukun



Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti menunjukkan kinerja yang sangat baik selama periode 2020-2024. Dari tahun 2020 hingga 2024, 100% kasus pelanggaran hak beragama berhasil ditindaklanjuti. Capaian ini tidak hanya memenuhi target yang

ditetapkan, namun juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak umat beragama. Selain itu di Kota Yogyakarta juga telah menetapkan kampung rukun, yaitu Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta.

Gambar 1.6: Pembinaan Kampung Rukun Beragama di Kota Yogyakarta



Kampung Rukun beragama di Kota Yogyakarta telah ditetapkan melalui SK Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 207 tahun 2024. Oleh karena itu dibutuhkan peran penyuluh agama dalam menjaga eksistensi kampung dan desa sadar kerukunan, agar tercipta kwasan/wilayah yang damai dan nyaman.

Gambar 1.7: Pemberian Hadiah Lomba Moderasi Beragama



Selain penguatan wilayah juga diselenggarakannya kegiatan yang mendorong pelaku untuk mengungkapkan dalam bentuk tulisan maupun video/film. Kegiatan tersebut terlaksananya lomba membuat video atau film tentang moderasi beragama yang terselenggara pada tahun 2022.

3. Sasaran Kegiatan 3: Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama.

Target untuk indikator ini adalah 100% setiap tahunnya, dan realisasi dari tahun 2020 hingga 2024 telah mencapai 100% Ini berarti bahwa Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ditargetkan untuk ditingkatkan layanannya melalui Bantuan Operasional (BOP) telah berhasil ditingkatkan. Layanan Sekretariat FKUB Kota Yogyakarta dapat ditingkatkan layanannya dengan penyediaan BOP sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap tahun untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Gambar 1.8 : Dialog Tokoh Lintas Agama



4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) semakin diperkuat sebagai garda terdepan dalam menjaga keharmonisan FKUB tidak hanya menjadi wadah dialog antar-pemimpin agama, tetapi juga proaktif menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, pemuda, dan perempuan. Inisiatif ini berhasil menciptakan ruang interaksi yang aman dan terbuka, memungkinkan perbedaan penafsiran agama dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa berkembang menjadi konflik. Peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat untuk menumbuhkan toleransi dari dalam, memastikan setiap umat beragama dapat menjalankan keyakinannya dengan damai dan saling menghormati.

Gambar 1.9: Kegiatan Dialog Lintas Agama Tahun 2020 dan 2021



Sebelumnya pembinaan lebih terpusat pada tokoh agama, kini program-program yang dijalankan berhasil menarik partisipasi aktif dari masyarakat luas. Adanya kegiatan sosial dan keagamaan yang melibatkan kolaborasi lintas mazhab dan kelompok usia, seperti bakti sosial, festival budaya, dan kegiatan edukasi bersama. Keterlibatan ini menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat, di mana identitas sebagai warga Yogyakarta yang penuh toleransi menjadi perekat

walaupun berbeda keyakinan sehingga dalam kurun waktu 2020 sd 2024 telah dilaksanakan minimal 5 kali dialog kerukunan.

5. *Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama.*

Selama periode 2020-2024, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas moderasi beragama pada penyuluh agama. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan, seminar, workshop, dan pembinaan rutin yang menekankan pada pemahaman nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan inklusivitas. Sejak tahun 2019, persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat tercatat sudah 100%, hal ini termotivasi dari predikat kota Yogyakarta yang telah memperoleh penghargaan “*Harmoni award*” pada tahun 2018. Ini menunjukkan efektivitas dan sustainabelnya program-program yang telah dilaksanakan, serta komitmen para penyuluh agama dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama.

6. *Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran*

Pada tahun 2020, data rumah ibadah di Kota Yogyakarta berdasarkan 584 dengan rincian; Masjid= 518, Gereja Protestan= 52, Gereja Katolik= 7, Pura= 1, Vihara= 6.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak rumah ibadah yang mampu menciptakan suasana yang terbuka, inklusif, dan nyaman bagi semua orang, tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, atau golongan. Hal ini selaras dengan upaya untuk menjadikan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang dialog, silaturahmi, dan kerjasama antar umat beragama.

Tabel 1.2
Data rumah ibadah di Kota Yogyakarta Tahun 2024

	Kemantren	Masjid	Gereja		Pura	Vihara	Klenteng
			Kristen	Katolik			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mantrijeron	45	2	1	0	0	0
2	Kraton	20	0	0	0	0	0
3	Mergangsan	39	4	1	0	0	0
4	Umbulharjo	125	4	0	0	1	0
5	Kotagede	56	2	0	0	0	0
6	Gondokusuman	63	13	2	1	1	0
7	Danurejan	24	2	0	0	0	0
8	Pakualaman	12	0	0	0	0	0
9	Gondomanan	24	5	1	0	2	0
10	Ngampilan	20	1	0	0	0	0
11	Wirobrajan	32	1	0	0	0	0
12	Gedongtengen	23	3	1	0	1	0
13	Jetis	33	12	1	0	1	1
14	Tegalrejo	52	7	0	0	0	0
Kota Yogyakarta		568	56	7	1	6	1

Sumber data : Kemenag Yogyakarta dalam angka 2025

7. Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang public

Peningkatan ini tidak hanya terbatas pada kegiatan konvensional seperti pengajian atau ceramah di masjid, tetapi juga melalui program-program inovatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Salah satu inisiatif program tersebut adalah program "Podsima" podcast Moderasi Beragama yang diluncurkan pada tahun 2023. Program ini berfokus pada memperkuat kerukunan antar umat beragama melalui siaran di Podcast Kemenag Kota Yogyakarta. Penyiaran juga menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan yang moderat dan relevan dengan isu-isu terkini.

Gambar 1.10: Siaran Keagamaan di Ruang Podcast



Podsima juga menghadirkan tokoh-tokoh Agama, penyuluh Agama, Baznas, MUI, IPHI sebagai pemateri Hal ini bertujuan agar pesan-pesan spiritual keagamaan dan kerukunan beragama di Kota Yogyakarta senantiasa terjaga.

8. *Sasaran Kegiatan 8: Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama*

Penguatan ini diwujudkan melalui serangkaian pelatihan dan bimbingan teknis kepada guru-guru agama, khususnya pelatihan metode pembelajaran Alquran yaitu metode “Madinah”. Pelatihan ini dirancang untuk membekali guru dengan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan metode cara membaca Al Qur’an yang tepat, serta penguatan moderasi beragama, yang mencakup nilai-nilai toleransi, anti-kekerasan, dan komitmen kebangsaan. Dengan demikian, guru didorong untuk tidak hanya mengajarkan doktrin keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur yang relevan dengan konteks sosial Indonesia yang majemuk. Hal tersebut dapat dibiasakan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk siswa seperti; (1) Kegiatan pendidikan agama bermuatan moderasi beragama bagi siswa secara klasikal atau sosialisasi, (2) Kegiatan Istigosah, Tahlil, Khotmil Qur'an bagi siswa untuk mendukung pembiasaan moderasi beragama, (3) Kegiatan pembiasaan pembacaan Al Qur'an sebelum pembelajaran.

Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama dengan Siswa aktif mengikuti kegiatan ekstra

keagamaan di madrasah, kegiatan tersebut seperti Nashid, Tanfidz, Qiroah, Hadroh dan lainnya.

9. *Sasaran Kegiatan 9: Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam*

Pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran ajaran agama Islam Kedua fungsi ini bergerak saling mendukung, dapat dijadikan bekal dalam mengumandangkan dakwah sedangkan dakwah bisa dimanfaatkan sebagai sarana dalam membangun sistem pendidikan Artinya, pesantren ikut bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki ilmu pengetahuan yang handal, serta dilandasi iman dan takwa yang kokoh. Pondok pesantren juga berfungsi sebagai lembaga pengembangan sosial kemasyarakatan.

Gambar 1.11: Kegiatan Pembinaan Kepala Madrasah Diniyah



Pondok pesantren dan PKPPS di Kota Yogyakarta sejumlah 36 dan PKPPS (Pondok Pesantren Salafiyah) sejumlah 1 lembaga Untuk mendukung adanya kemandirian pondok pesantren. Pondok pesantren diberi pelatihan pembuatan roti melalui dana operasional pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang dilaksanakan di Pesantren Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2023.

Untuk lebih mendekatkan dan silaturahmi antara pemerintah dengan pondok pesantren, tiap tahun melalui belanja langsung pemerintah Kota Yogyakarta dan dana hibah APBD pada hari santri diadakan kegiatan reresik pondok dengan melibatkan ASN Kemenag Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

10. Sasaran Kegiatan 10: Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama.

Berbagai ritual budaya yang berakar pada agama, tradisi, adat-istiadat, dan kearifan lokal banyak dilestarikan demi menjaga harmoni dan keseimbangan. Diantara ritual budaya yang mengandung nilai agama Islam yang sering diselenggarakan adalah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), Pesparawi dan Pesparani. Semakin banyak jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama dapat menunjukkan adanya peningkatan penghormatan atas keragaman agama dan budaya yang merupakan implementasi pengamalan nilai-nilai agama.

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta berpartisipasi aktif dan dipercaya dalam mengelola kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), Pesparawi dan Pesparani tersebut. Hal ini dibuktikan sejak tahun 2020 anggaran pemerintah Kota Yogyakarta di Hibah kelolakan ke Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Tabel 1.3
Dana Hibah APBD 2020-2024 Kota Yogyakarta

NO	KEGIATAN	2020 (000)	2021 (000)	2022 (000)	2023 (000)	2024 (000)
1	MTQ	457.390	444.100	18.310	360.635	39.900
2	STQ	0	45.655	108.680	30.670	154.570
3	PESPARAWI	0	7.750	19.638	68.438	49.058
4	PESPARANI	0	45.380	20.610	63.882	52.162

Gambar 1.12: Pemenang MTQ & STQ Kota Yogyakarta Th 2024



11. Sasaran Kegiatan 11: Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

Salah satu kekhusukan ibadah adalah baiknya sarana pendukung peribadatan. Dari hal itu Kementerian Agama Kota Yogyakarta mencoba hadir sebagai salah satu instansi yang ikut menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai langkah strategis adalah mengupayakan bantuan perbaikan tempat ibadah dengan mengupayakan adanya APBD Pemerintah Kota Yogyakarta. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan diberikannya dana rehap oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui Hibah kepada Kementerian

Agama Kota Yogyakarta.

Gambar 1.13: Penyerahan Bantuan Sarana Prasarana Tempat Ibadah



Bantuan kitab suci dan buku keagamaan juga terlaksana, walaupun hanya melanjutkan kebijakan dalam pembagian buku dan kitab, setiap tahun dapat menyalurkan 200 buku dan kitab melalui safari taraweh Romadlon dan kegiatan keagamaan lainnya.

Layanan syariah yang disediakan meliputi layanan konsultasi dan koordinasi terkait pengamalan ajaran dan hukum

agama. Salah satu layanan syariah sebagai program prioritas adalah sertifikasi produk halal. Target yang harus dicapai pada tahun 2023 sebanyak

1.000 produk makanan Pada tahun 2024 di setiap kecamatan pengurusan sertifikasi produk halal diharapkan terlayani 140 jenis produk Dari target tersebut Kota Yogyakarta tercapai sebanyak 2.520 produk.

Tim Ukur Arah Kiblat dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta melaksanakan tugasnya untuk mengetahui arah kiblat tempat ibadah (masjid dan musholla) yang lebih akurat dan kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat sekitar. Sehingga jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah bagi umat Islam setiap tahunnya minimal 20 lokasi sehingga dalam waktu 5 tahun mencapai 100 lokasi tempat ibadah dan tanah lapang.

12. Sasaran Kegiatan 12: Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk

Mulai tahun 2020, Menteri Agama mencanangkan program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Program yang akan menyasar 106 KUA pada tahun 2021, dan sesuai surat keputusan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 320 Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Revitalisasi KUA Tahun 2022 terdapat 2 KUA yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta mendapat kesempatan sebagai KUA yang direvitalisasi yaitu KUA Kotagede dan KUA Umbulharjo Pada tahun 2023 sesuai surat keputusan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 84 Tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023 terdapat penambahan KUA Tegalrejo. KUA Gondomanan dan KUA Wirobrajan ditetapkan berdasarkan SK Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 84 Tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Revitalisasi KUA.

Pada tahun 2024 melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta No 1606 tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 menetapkan KUA Pakualaman sebagai KUA Revitalisasi tahun 2024 sehingga dari jumlah 14 KUA yang sudah revitalisasi ada 6 KUA atau (42,85%).

Gambar 1.14
Pelaksanaan BRUS & Bimbingan Catin



Keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin akan berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah mawadah warohmah, bahagia dan kekal.

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon pengantin (Binwin Catin) tahun 2020 mencapai 600 orang catin, tahun 2021 mencapai 1200 orang catin, tahun 2022 mencapai 1680 orang catin, tahun 2023 terjangkau 1.920 orang catin ditambah Bimbingan Catin secara mandiri yang dilakukan di KUA. Kemantren sebanyak

6.436 orang atau 3.218 pasang sehingga total 8.356 orang catin Sedangkan tahun 2024 hanya Bimbingan Catin secara mandiri yang dilakukan di KUA Kemantren sebanyak 8.072 pasang atau 16.144 orang.

Remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pranikah dapat mengurangi angka perceraian yang disebabkan kurangnya tingkat kedewasaan pasangan suami isteri dalam menghadapi problematika rumah tangga. Di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta diutamakan untuk tingkat menengah atas (SMA, SMK dan MA) yaitu Tahun 2020 realisasi 50 siswa, tahun 2021 dengan peserta 120 siswa, tahun 2022 dengan peserta 250 siswa, tahun 2023 dengan peserta 300 siswa.

Sedangkan tahun 2024 dilakukan secara mandiri oleh seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan KUA.

13. Sasaran Kegiatan 13: Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga

Pusaka sakinah yang diamanahkan oleh Kemenerian Agama telah dilaksanakan sejak tahun 2023 dan telah terlaksana pada KUA Revitalisasi yaitu:

- KUA Gondomanan Tanggal 16 dan 22 Mei 2023
- KUA Wirobrajan Tanggal 23 dan 30 Mei 2023
- KUA Tegaltrejo Tanggal 11 dan 25 Mei 2023
- KUA Kraton Tanggal 17 dan 24 Mei 2023

Sebagai sasarannya dari bimbingan keluarga tersebut adalah 40 Keluarga untuk 40 keluarga dan tahun 2024 Kegiatan tersebut telah terlaksana di 2 KUA yaitu KAU Kotagede dan Umbulharjo, serta menjadi piloting pusaka sakinah. Realisasinya terlaksana dalam 2 gelombang pertama dilaksanakan pada tahun 2022 dengan capaian target 90 orang, yang dibagi menjadi 3 angkatan dengan 2 kali kegiatan bimbingan untuk setiap angkatan Tahun 2022 dapat melaksanakan bimbingan pada 150 orang tetapi hanya dengan sekali bimbingan Tahun 2023 dapat melaksanakan 6 kegiatan bimbingan di 3 lokasi sehingga tercapai 180 orang peserta.

14. Sasaran Kegiatan 14: Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

Berdasarkan KMA Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2020 diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai Pada tahun 2021 dengan adanya KMA Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2021 diambil karena Pemerintah juga mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19).

Masa tunggu pada akhir tahun 2023 selama 33 tahun atau estimasi keberangkatan pada nomor porsi terakhir yaitu tahun 1478 H./ 2057 M. berdasarkan cek nomor porsi pada website hajikemenag.go.id.

Tabel 1.4
Rekap Pendaftaran Calon Jamaah Haji Kota Yogyakarta
Tahun 2020-2024

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	73	48	51	84	50
Februari	53	36	34	48	49
Maret	42	32	43	55	40
April	7	36	45	48	67
Mei	6	31	83	49	95
Juni	33	45	103	87	127
Juli	22	24	73	70	133
Agustus	33	17	87	60	77
September	29	36	70	52	77
Oktober	42	43	66	38	55
Nopember	26	58	51	58	48
Desember	45	63	89	66	69
Jumlah	411	469	795	715	887

Sumber data : Aplikasi Siskohaj



15. Sasaran Kegiatan 15: Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji

Sebelum tahun 2020, tingkat pemahaman jamaah terhadap tata cara ibadah haji, khususnya terkait ritual yang kompleks seperti tawaf dan sa'i, cenderung variatif. Namun melalui inovasi materi dan metode pembinaan, misalnya penggunaan video simulasi dan praktik langsung di miniatur kakkah, tingkat pemahaman jamaah meningkat secara merata.

Berdasarkan studi kasus, salah satu kendala utama di tahun-tahun sebelumnya adalah kurangnya pemahaman jamaah mengenai alur administrasi dan kesehatan. Untuk mengatasi hal ini, Kemenag Kota Yogyakarta memperkenalkan sistem informasi dan sosialisasi yang lebih

intensif, termasuk penggunaan grup media sosial dan aplikasi pengingat. Hasilnya, persentase jemaah yang mengalami kendala administrasi, seperti ketidaklengkapan dokumen atau masalah visa, menurun drastis sebesar 15%. Di samping itu, tingkat kesadaran jemaah akan pentingnya pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi juga meningkat, yang tercermin dari data 95% jemaah telah melengkapi semua persyaratan kesehatan sebelum keberangkatan.

16. Sasaran Kegiatan 16: Meningkatnya pengelolaan aset wakaf

Berbagai peraturan sudah jelas memberikan persyaratan dan pengaturan tentang prosedur perwakafan sampai dilakukannya pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah Untuk mengurangi masalah dan konflik tanah wakaf yang timbul di masyarakat, diperlukan adanya bantuan pengurusan sertifikasi tanah wakaf sehingga terbit kepastian hukum bagi aset wakaf yang ada.

Layanan ikrar wakaf dilaksanakan di tiap-tiap KUA di Kemantren. Ikrar Wakaf yang dilaksanakan pada tahun 2024 terdapat 984 bidang dari 1,016 bidang yang telah memiliki sertipikat wakaf. Sebaran tanah wakaf di Kota Yogyakarta terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 1.5
DATA TANAH WAKAF TAHUN 2024
KOTA YOGYAKARTA

NO	KEMANTREN	JUMLAH KESELURUHAN		SUDAH BERSERTIFIKAT		DALAM PROSES		BELUM PROSES	
		Jumlah Lokasi	Luas M2	Jumlah Lokasi	Luas M2	Jumlah Lokasi	Luas M2	Jumlah Lokasi	Luas M2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jetis	15	3,737	15	3,737	-	-	-	-
2	Gondokusuman	43	10,833	42	10,690	1	143	-	-
3	Pakualaman	14	4,904	14	4,904	-	-	-	-
4	Ngampilan	43	9,630	43	9,630	-	-	-	-
5	Kraton	34	7,852	32	7,545	2	307	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Tegalrejo	96	25,006	93	21,758	3	3,248	-	-
7	Mantrijeron	97	26,211	94	25,895	3	316	-	-
8	Kotagede	223	65,218	215	58,201	-	-	8	7,017
9	Wirobrajan	56	28,403	56	28,403	-	-	-	-
10	Umbulharjo	263	88,499	248	84,239	15	4,260	-	-
11	Danurejan	17	5,758	17	5,758	-	-	-	-
12	Mergangsan	81	312,209	81	312,209	-	-	-	-
13	Gondomanan	20	5,327	20	5,327	-	-	-	-
14	Gedongtengen	14	4,446	14	4,446	-	-	-	-
JUMLAH		1,016	598,033	984	582,742	24	8,274	8	7,017

Sumber data : laman siwak kemenag.go.id

17. Sasaran Kegiatan 17: Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat

Pada sasaran ini dilaksanakan kegiatan antara lain: 1) melaksanakan kegiatan pembinaan amil lembaga zakat Kota Yogyakarta, 2) monitoring UPZ yang berada pada 14 Kemantren Kota Yogyakarta, 3) Pembinaan Literasi Zakat dengan maksud memberikan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan, distribusi dan pengembangan zakat. Sehingga lembaga zakat mempunyai peran yang lebih, 4) Pendampingan program kampung zakat Dengan adanya kampung zakat ini, menjadi upaya untuk membentuk kemandirian umat, menjadi kampung mandiri. Selain itu juga akan terjadi pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Disisi lain dengan program ini akan mendorong dan memunculkan kepedulian dari para muzaki, untuk mewujudkan itu semua maka perlu adanya sinergi, kebersamaan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Lembaga terkait harus dilibatkan antara lain Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat termasuk juga pemerintah dan tokoh agama serta tokoh masyarakat Di Kota Yogyakarta terdapat 3 Kampung Zakat, yaitu; di Kemantren Umbulharjo, Kemantren, Tegalrejo (Kampung Sudagaran) dan Kemantren Gedongtengen (Kampung Jlagran).

Tabel 1.6
Data LAZ Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	NAMA LAZ	ALAMAT	NOSK/TGL
1	BAZNAS Kota Yogyakarta	Komplek Masjid PDiponegoro Balaikota Yogyakarta	No. 150 Tahun 2021 tgl 1 Februari 2021
2	LAZISNU Kota Yogyakarta	Jl.Gedongkuning No24 , Masjid Al Huda Lt2	No. 187 Tahun 2019 tgl 20 Mei 2019
3	LAZISMU Kota Yogyakarta	Jl.Sultan Agung No 14 Kota Yogyakarta	No. 388 Tahun 2019 tgl 16 Desember 2019
4	LAZ Amal Syuhada Kota Yogyakarta	Jl.C. Simanjuntak Terban Gondokusuman Yogyakarta	No. 923 Tahun 2019 tgl 24 September 2019
5	LAZ Goedang Zakat Al Khairaat Kota Yogyakarta	Jl.Veteran Gang Madukoro UH IV/ 768 C Warungboto Yogyakarta	No. 381 Tahun 2020 tgl 4 Maret 2020

Sumber data Penyelenggara Zakat Kemenag Kota Yogyakarta

Melalui penyelenggara zakat wakaf, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta juga melaksanakan pentasyarufan zakat profesi ASN Kantor Kementerian Agama setiap tahunnya Sasaran zakat profesi tersebut diperuntukkan bagi penjaga malam dan kebersihan Kantor KUA Kemantren se Kota Yogyakarta dan pegawai PTT kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Gambar 1.15
Pentasyarufan Zakat Profesi dan Tukin di Kota Yogyakarta



1.1.2. Kondisi Umum Bidang Pendidikan

Kondisi Umum Bidang Pendidikan merupakan keadaan aktual dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan di Kota Yogyakarta Hal ini mencakup capaian dan permasalahan dari sasaran kegiatan dalam bidang pendidikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020-2024, serta identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi mutu pendidikan Kegiatan yang dilakukan pada bidang pendidikan meliputi:

1. *Sasaran Kegiatan 18: Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif*

Gambar 1.16
Pembelajaran dengan Penerapan
Kurikulum Inovatif MA



Berbagai upaya yang telah dilakukan seperti Guru yang mengikuti Pengembang Kurikulum Madrasah tersusun sesuai ketentuan seperti (a) Kegiatan workshop Pengembang Kurikulum Madrasah sesuai ketentuan dengan pola pembelajaran inovatif, (b) Kegiatan MGMP masing-masing guru Bidang studi di Kota Yogyakarta. Penerapan metode inovatif dalam pembelajaran setiap mata pelajaran dengan penyediaan Alat Peraga yang digunakan dan penyusunan dokumen RPP masing-masing bidang studi berdasarkan kurikulum terbaru.

Berdasarkan Surat
Keputusan Kakanwil DIY No 720

tahun 2020 madrasah Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai Madrasah unggul yaitu:

- 1) Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Yogyakarta, sebagai Madrasah unggul Bidang Akademik
- 2) Madrasah Aliyah Negeri 2 Yogyakarta, sebagai Madrasah unggul Bidang Akademik dan Olah raga
- 3) MA Muallimin Muhammadiyah Dan MA Muallimat Muhammadiyah, sebagai Madrasah unggul Bidang Agama

Sedangkan berdasarkan SK Dirjen Pendis No 4.923 tahun 2016 Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta ditetapkan sebagai Madrasah penyelenggara program keagamaan.

2. Sasaran Kegiatan 19: Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan

Peningkatan kualitas penilaian pendidikan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada periode 2020-2024 ditunjukkan oleh adopsi sistem yang lebih modern, transparan, dan terstruktur. Salah satu indikator utamanya adalah implementasi Ujian Madrasah Berbasis Komputer (UMBK). Sistem ini menggantikan ujian manual, memungkinkan proses penilaian yang lebih objektif dan efisien. Dengan UMBK, data nilai siswa dapat langsung terpampang secara real-time di server, meminimalisasi kesalahan manusia dan memastikan transparansi hasil laporan dari pengawas madrasah, menunjukkan bahwa analisis butir soal dapat dilakukan secara langsung, membantu pengawas dan guru untuk mengevaluasi kualitas soal dan efektivitas pembelajaran secara lebih cepat dan akurat.

Kemenag Yogyakarta juga mengintensifkan program Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) dan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang dilakukan secara berkala. Program-program ini tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga alat pembinaan yang holistik. Dengan adanya penilaian ini, madrasah didorong untuk melakukan introspeksi dan menyusun rencana strategis yang berbasis data, laporan dan penyusunan rencana strategis berdasarkan evaluasi kinerja dan sarana prasarana.

3. *Sasaran Kegiatan 20: Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran*

Dengan adanya Pandemi Covid 19 telah memaksa dunia pendidikan merubah sistem pembelajaran Karena keterpaksaan itulah saat ini hampir semua guru dan murid menerapkan teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai aplikasi seperti zoom meeting, google meeting, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data SIMSARPRAS dan data SIMPATIKA, pada akhir tahun 2024 terdapat 18 lembaga madrasah (100%) yang menyediakan sarana TIK untuk e-pembelajaran karena tuntutan perkembangan zaman.

Gambar 1.17: Penerapan dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran



4. *Sasaran Kegiatan 21: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan*

Berdasarkan aplikasi emis diperoleh data lengkap tentang sarana dan prasarana yang digunakan oleh Lembaga tingkat RA, MI, MTs dan MA Semua dilakukan dengan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan perawatan sarana yang ada seperti asset tetap (Gedung dan bangunan) dan aset tidak tetap berupa peralatan dan mesin. Tetapi berdasarkan standart pelayanan minimal tentang sarana berdasarkan laporan pemantauan dari pengawas madrasah rata-rata masih sebesar 90% yang sesuai.

Gambar 1.18: Belanja Peralatan MAN dan Gedung SBSN MIN I YK

Tahun 2023 terdapat renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana Pendidikan dengan anggaran bersumber SBSN antara lain Pembangunan Laboratorium Komputer MAN 1, Pembangunan Asrama Siswa MAN 2 Yogyakarta, Pembangunan Ruang Kelas MTSN 1 Yogyakarta dan Pembangunan Ruang Kelas MIN 1 Yogyakarta.

5. *Sasaran Kegiatan 22: Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, & berbakat.*

Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sejak tahun 2021 terdapat perubahan kebijakan tentang penganggaran pada pengelolaan dana BOS dan PIP untuk madrasah swasta berada di tingkat pusat. Sehingga dalam perjanjian kinerja tidak dicantumkan sejak tahun tersebut sebagai target kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Namun tetap dilaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan BOS, BOP, dan PIP setiap tahunnya dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Tabel 1.7
Data Penerima BOS pada Tahun 2024

No	Tingkat	Lembaga	Siswa	satuan	Total
1	RA	11	314	600.000.000	188.400.000
2	MIS	3	477	940.000	448.380.000
3	MIN	1	499	940.000	469.060.000

4	MTs	6	2.452	1.140.000	2.795.280.000
5	MA	4	1.624	1.560.000	2.533.440.000
Jumlah Total		25	4.867		6.434.560.000

Sumber data : Diolah dari data siswa penerima BOS seksi Dikmad

Berdasarkan data laporan seksi pendidikan madrasah, penerima bantuan melalui program BOS tahun 2020 sebanyak 4.329 siswa, sedang pada tahun tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 9,44%, sehingga penerima BOS menjadi 4.088 siswa, sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi 4135 siswa, dan 2023 terus menurun menjadi 4.578 Pada tahun 2024, jumlah siswa penerima BOS melonjak tajam menjadi 4.867 siswa.

6. *Sasaran Kegiatan 23: Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah.*

Sasaran kegiatan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah siswa RA yang ditingkatkan mutunya melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020, sebanyak 100 anak, tahun 2021 tercatat 491 anak menerima manfaat dari program ini. Pada tahun 2022 penerima BOP RA sebanyak 377 anak, pada tahun 2023 sebanyak 385 anak. Terakhir pada tahun 2024 jumlah siswa penerima BOP mencapai 400 anak. Peningkatan jumlah siswa penerima BOP ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan prasekolah dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk mengikuti pendidikan yang berkualitas sejak usia dini.

7. *Sasaran Kegiatan 24: Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan*

Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan merupakan salah satu faktor agar kualitas pendidikan bisa berjalan dengan baik, sehingga membutuhkan peningkatan kualitas para pendidik. Dengan hal tersebut seksi Pendidikan Madrasah membuat terobosan baru yaitu memperkuat peran pendidik melalui Inovasi Pendidik Merdeka.

Inovasi Pendidik MERDEKA merupakan sebuah akronim, Mandiri, Empati, Religius, DediKatif. 1) Mandiri adalah bagaimana Kemenetrian



Agama hadir memberikan bekal Kompetensi, Skill dan informasi update kepada guru agar dapat berdaya guna secara mandiri menghadapi dinamika pembelajaran di kelas Kegiatan yang dilakukan untuk memupuk kemandirian guru salah satunya adalah memfasilitasi kegiatan workshop, bimtek, pendampingan dan lainnya sebagai bekal guru dalam menghadapi berbagai tantangan pembelajaran kekinian (Kompetensi Pedagogik). 2) Empati adalah bagaimana memupuk guru agar memiliki rasa empati terhadap lingkungan kerjanya secara menyeluruh termasuk terhadap siswa di kelas. Kegiatan yang dilakukan dalam Upaya memupuk rasa empati ini adalah dengan memberikan bekal pembinaan, penguatan keimanan serta motivasi dalam setiap kegiatan yang diikuti oleh guru, disamping juga hadir dalam berbagai kegiatan di madrasah (Kompetensi Profesional dan Kompetensi Sosial). 3) Religius adalah bagaimana guru madrasah harus mampu menjadi pembeda diantara guru lain. Bagaimana guru-guru PAI dan ustadz di Pondok Pesantren harus mampu menjadi suri tauladan di lingkungan yang heterogen. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mewujudkan religiusitas guru adalah dengan memberikan bekal pembinaan, penguatan keimanan serta motivasi dalam setiap kegiatan yang diikuti oleh guru, disamping juga hadir dalam berbagai kegiatan di madrasah, sekolah maupun Pondok Pesantren (Kompetensi Kepribadian) 4) DEdiKatif adalah bagaimana memupuk sikap pengorbanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk tenaga, pikiran dan waktu untuk mencapai tujuan positif Sikap dedikatif ini diharapkan tumbuh seiring dengan hadirnya kemenag yang diwujudkan dalam berbagai program dalam rangka membekali guru agar siap menghadapi tantangan dan kesulitan dalam dunia Pendidikan.

Layanan Inovasi Pendidik MERDEKA meliputi: 1) Pelatihan Canva bagi Guru RA. 2) Workshop Penulisan Berita bagi Guru RA. 3) Pelatihan Gasing Bagi Guru Mata Pelajaran Matematika di Madrasah. 4) PKB Mandiri KKG/MGMP/MGBK di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. 5) Bimtek Penyusunan Soal Berbasis Literasi dan Numerasi. 6) Bimtek Pemutakhiran data Emis madrasah 40. 7) Workshop Penyusunan Modul Ajar berbasis IT. 8) Workshop pembuatan media pembelajaran

menggunakan Canva bagi guru RA. 9) Penguatan Tenaga Operator Madrasah. 10) Pendampingan GTK berprestasi. 11) Workshop pembuatan media pembelajaran menggunakan AI. 12) Workshop Penyusunan Best Practice bagi GTK Madrasah. 13) Bimtek Penyusunan Kurikulum Madrasah. 14) Workshop Penyusunan Kurikulum Ekstrakurikuler Bermuatan Moderasi Beragama. 15) Layanan Kontrak Prestasi Kepala Madrasah. 16) Bimtek Pengisian Borang Akreditasi Madrasah.

Dari inovasi pendidik merdeka tersebut dapat dilihat dampaknya terhadap pembelajaran antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.8: Inovasi Pendidik Merdeka

No	Nama Kegiatan	Before	After	Dampak
1	Workshop Penyusunan Media Pembelajaran menggunakan Canva bagi guru RA	Guru masih konvensional dalam membuat media pembelajaran	Guru dapat membuat media pembelajaran menggunakan canva dengan berbagai variasi	Pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik, komunikatif dan merangsang siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran
2	Pelatihan penulisan berita bagi guru RA	Minimnya kemampuan guru RA dalam menulis berita seputar kegiatan yang dilaksanakan di RA	Guru-guru RA mulai terlatih menuliskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk dimuat dalam web kemenag	Masyarakat luas menjadi mengetahui informasi kegiatan dan program-program yang dilakukan oleh RA
3	Pelatihan Metode Gasing Bagi Guru Mata Pelajaran Matematika di Madrasah	Guru masih menggunakan metode susun dan porogapit	Guru mempunyai pilihan metode gasing yang lebih menarik dan menumbuhkan minat belajar siswa	Pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan dan interaktif
4	PKB Mandiri bagi KKG/MGMP/MGBK	Kegiatan pokja sangat pasif bahkan tidak ada sama sekali	Sharing kegiatan antar pokja memunculkan banyak program kerja pokja	Guru mendapatkan kesempatan belajar dari berbagai program kegiatan pokja sehingga berdampak pada bervariasinya metode pembelajaran yang digunakan guru di kelas

5	Layanan Jemput Bola Pendampingan Operator Emis	Operator madrasah kurang menguasai cara kerja aplikasi Emis	Pendampingan cara kerja aplikasi secara langsung di RA/Madrasah masing masing	Tepat waktu dalam melakukan Update data siswa, lembaga, sarpras, PTK yang ada di aplikasi EMIS
6	Pendampingan GTK Berprestasi	Selama ini GTK berprestasi secara mandiri mengikuti ajang lomba mewakili tingkat Kota Yogyakarta	Secara kontinue mendampingi GTK madrasah yang akan mengikuti lomba dengan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi	GTK madrasah mendapatkan berbagai apresiasi kejuaraan dalam event yang diikutinya
7	Layanan Jemput Bola Pendampingan Penyusunan Laporan BOS	Laporan BOS sering terlambat & penyelesaian selalu limit waktu akhir	Melakukan pendampingan penyusunan pelaporan BOS	Terselesaikannya penyusunan pelaporan BOS tepat waktu bahkan ada yang lebih awal dari deadline
8	Layanan Jemput Bola Penyusunan EDM eRKAM	EDM eRKAM di aplikasi terlambat diinput sehingga laporan terganggu	Melakukan pendampingan di RA/Madrasah masing-masing tentang penyusunan EDM eRKAM	Penginputan EDM eRKAM pada aplikasi sesuai deadline waktu yang ditentukan
9	Fastrack (Layanan Cepat) meliputi; permohonan rekomendasi, surat keterangan, surat pengantar, mutasi keluar masuk siswa dan guru	Layanan persuratan sering terkendala dalam pengesahan dan lain-lain	Memangkas alur penerbitan persuratan (rekomendasi, mutasi dll) dengan skema prioritas dan tte	Pengguna layanan tidak lagi menunggu lama untuk penerbitan permohonan persuratan

Gambar 1.19: Pelatihan Pendidik & Tenaga Kependidikan



Tabel 1.9:
Data guru Sertifikasi Tahun 2024

No	Satker	PNS		PPPK		Total
		TPG	Non	TPG	Non	
1	MAN 1 Yogyakarta	54	11	2	3	70
2	MAN 2 Yogyakarta	53	11	2	3	69
3	MTsN 1 Yogyakarta	46	18	0	0	64
4	MIN 1 Yogyakarta	20	3	1	1	25
5	DPK Madrasah Swasta	31	2	0	0	33

Sumber data : Data pendidik dan kependidikan seksi Dikmad

Penilaian kinerja guru terselenggara sesuai ketentuan sehingga setiap guru akan dinilai oleh tim penilai yang ditunjuk dengan surat keputusan, setiap guru menyediakan dokumen PKG Tahun 2024 yang akan dinilai.

Tabel 1.10:
Data rekapitulasi Penerima TPG Madrasah & GPAI

No	Satker	Jumlah
1	MIN 1 Yogyakarta	25
2	MTsN 1 Yogyakarta	64
3	MAN 1 Yogyakarta	70
4	MAN 2 Yogyakarta	69
5	DPK Madrasah Swasta	33
	Jumlah Total	261

No	Satker	Jumlah
1	SD	12
2	SMP	8
3	SMA / SMK	17
4	Pengawas	4
5	DPK PNS Dinas Pendidikan	30
6	DPK P3K Dinas Pendidikan	70
	Total	141

Sumber data : Daftar Permintaan TPG Guru

Berikut ini data perlombaan yang diikuti guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tahun 2020 sd 2024 dan memperoleh prestasi:

- Peringkat 1 kategori pembuatan karya buku solo, jenjang MTs dalam rangka Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2020 di IKanwil Kementerian Agama DIY.
- Peringkat 1 kategori pembuatan karya buku antologi jenjang MTs dalam rangka Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2020 di IKanwil Kementerian Agama DIY.
- Juara III Lomba Pembuatan Video pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah tingkat Kanwil Kemenag DIY Tahun 2021.
- Guru MtsN 1 Yogyakarta memperoleh Juara 3 GTK Berprestasi jenjang

MTs dalam rangka HGN yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama DIY 2022.

Gambar 1.20:
Prestasi Guru dan Tenaga Kependidikan di Kota Yogyakarta



- e. Guru MtsN 1 Yogyakarta memperoleh penghargaan sebagai Guru Inspiratif Favorit GTK Kementerian Agama RI tahun 2022,
 - f. Guru MAN 2 Yogyakarta Juara 1 lomba essai bertemakan Moderasi Beragama Kanwil Kemenag DIY tahun 2023,
 - g. Pustakawan MIN 1 Yogyakarta, menerima penghargaan sebagai Pustakawan Berprestasi, dalam rangka Hari Guru Nasional 2024,
 - h. Juara III Lomba Read Aloud pada peringatan Hari Literasi Nasional yang diadakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Yogyakarta tahun 2024.
8. *Sasaran Kegiatan 25: Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik*

Berdasarkan KMA No 745 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama, sasaran program PPG pada satuan kerja Kementerian agama yaitu: para pendidik pada seluruh jenjang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang memenuhi kualifikasi akademik lulusan Sarjana (S1) atau diploma IV (D-IV) atau Pondok Pesantren yang sudah dipersamakan sebagai berikut: (1) Guru pada RA, (2) Guru kelas dan guru

bidang studi pada MI, (3) Guru mata Pelajaran pada MTs, MA dan MAK, (4) Guru Pendidikan agama pada sekolah dan (5) Guru mata Pelajaran keagamaan pada satuan Pendidikan keagamaan Persyaratan lain seperti peserta yang dapat mengikuti PPG melalui seleksi maka kecil kemungkinan ustadz di pondok pesantren dapat mengikuti PPG sehingga selama 5 tahun ini tidak ada guru Madrasah Diniyah sebagai penerima TPG

9. *Sasaran Kegiatan 26: Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi*

Kemenag Yogyakarta telah mengambil langkah proaktif dalam membina madrasah dan pondok pesantren agar memenuhi standar akreditasi dengan baik. Peningkatan ini didukung oleh data laporan internal yang menunjukkan adanya serangkaian workshop dan bimbingan teknis (bimtek) yang rutin diselenggarakan untuk para pengelola lembaga pendidikan. Materi bimtek tidak hanya fokus pada pemenuhan dokumen, tetapi juga pada pemahaman substansi indikator penilaian akreditasi Proses ini telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesiapan lembaga dalam menghadapi asesmen, mempercepat proses pengumpulan dan verifikasi data, serta memastikan validitas informasi yang disajikan.

Akselerasi akreditasi tidak hanya terlihat dari bertambahnya jumlah lembaga yang terakreditasi, tetapi juga dari peningkatan peringkat akreditasi. Laporan internal menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada jumlah madrasah yang berhasil meraih peringkat akreditasi "A" dan "B", mencerminkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang semakin matang. Peningkatan ini merupakan dampak langsung dari pendampingan sistematis yang mendorong perbaikan di berbagai aspek, mulai dari manajemen kurikulum, kualifikasi guru, hingga sarana dan prasarana.

Tabel 1.11:
AKREDITASI MADRASAH JENJANG RA

NO	Nama Madrasah	Status Akreditasi	Tahun Akreditasi
1	RA BUNAYYA	B	2017
2	RA KUSUMA MULIA	B	2021
3	RA AL HUSNA	B	2017
4	RA TIARA CHANDRA	B	2022

5	RA AL-HUDA	B	2023
6	RA JAUZAA RAHMA	A	2017
7	RA IT TAHFIDZUL QUR'AN TAMAN CENDIKIA YOGYAKARTA	B	2023
8	RA MUADZ BIN JABAL	A	2017
9	RA ANANDA	B	2019
10	RA AL-KHAIRAAT TEGALREJO	B	2018
11	RA BINTANG KECIL	B	2017
12	RA SALSABILA DARUSSALAM	B	2023

**Tabel 1.12:
AKREDITASI MADRASAH JENJANG MI**

NO	Nama Madrasah	Status Akreditasi	Tahun Akreditasi
1	MIS MA'HAD ISLAMY	B+	2018
2	MIN 1 YOGYAKARTA	A	2018
3	MIS AL ISLAM	B	2019
4	MIS NURUL UMMAH	B	2019

**Tabel 1.13:
AKREDITASI MADRASAH JENJANG TsANAWIYAH**

No	Nama Madrasah	Hasil Akreditasi	Tahun Sertifikasi
1	MTs N 1 Yogyakarta	A	2024
2	MTs Muallimin	A	2025
3	MTs Nurul Ummah	A	2019
4	MTs L/B Yaketunis	B	2019
5	MTs Muallimat	A	2023
6	MTs Muhammadiyah Karangjaten	A	2025
7	MTs Muhammadiyah Gedongtengen	A	2025

**Tabel 1.14:
REKAPITULASI AKREDITASI MADRASAH ALIYAH**

No	Nama Madrasah	Hasil Akreditasi	Tahun perolehan
1	MAN 2 Yogyakarta	A	2023
2	MA MUH 1	B	2021
3	MA Harun Asy Syafi'i	A	2025
4	MA Muallimin	A	2025

10. Sasaran Kegiatan 27: Meningkatnya budaya mutu Pendidikan

Beberapa prestasi membanggakan yang diraih oleh lembaga pendidikan dan siswa di lingkungan Kemenag Kota Yogyakarta antara lain sebagai contoh dari banyak prestasi yang diperoleh :

a. Tingkat Nasional,

- 1) MAN 2 Yogyakarta meraih 5 medali emas dan 3 Medali Perak di Lanud Adisucipto Sport Center Yogyakarta Wimaya Internasional Karate Championship tahun 2023.
- 2) MAN 2 Yogyakarta berhasil meraih juara 3 dalam ajang Kompetisi Debat Bahasa Inggris tingkat nasional pada tahun 2024.
- 3) MAN 1 Yogyakarta berhasil meraih juara 1 dalam ajang Kompetisi Sains Madrasah (KSM) tingkat nasional pada tahun 2023.
- 4) MTsN 1 Yogyakarta berhasil meraih medali perak dalam ajang Olimpiade Matematika tingkat nasional pada tahun 2022.
- 5) Olimpiade Sains Madrasah (OSM): MI dari Kota Yogyakarta dapat meraih medali atau penghargaan dalam ajang OSM tingkat nasional, baik dalam bidang Matematika, IPA, maupun lainnya.
- 6) Kompetisi Sains Madrasah (KSM): Siswa MI dapat menunjukkan prestasi dalam KSM tingkat nasional, yang menguji kemampuan mereka dalam bidang sains dan keagamaan.
- 7) Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR): Siswa MI dapat menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional melalui LKIR.
- 8) Ajang Kreativitas Siswa: Siswa MI dapat berpartisipasi dan meraih penghargaan dalam ajang kreativitas siswa tingkat nasional, seperti lomba Robotik, lomba desain, atau lomba seni.

b. Tingkat Internasional

- 1) Siswa MAN 2 Yogyakarta, meraih Medali emas dan perunggu dalam even 10th Fully Residential Schools International Symposium 2022 (FRIS) Malaysia dan Juara 1 Presentasi Bahasa Jepang Tingkat SMA/MA/SMK diselenggarakan oleh KPBJ Jatim dan The Japan Foundation Jakarta.

- 2) Siswa MAN 1 Yogyakarta meraih medali perunggu dalam ajang International Science and Engineering Fair (ISEF) pada tahun 2024.
- 3) Siswa MAN 1 Yogyakarta meraih medali perak KTI International Festival Of Engineering And Science Tunisia 2024.

Tabel 1.15
Data Prestasi Menurut Tingkat Kejuaraan

NO	TINGKAT	2022	2023	2024	Jumlah
1	KABUPATEN/KOTA	33	1	247	247
2	PROVINSI	10	0	31	31
3	NASIONAL	10	4	0	0
4	INTERNASIONAL	1	0	2	3

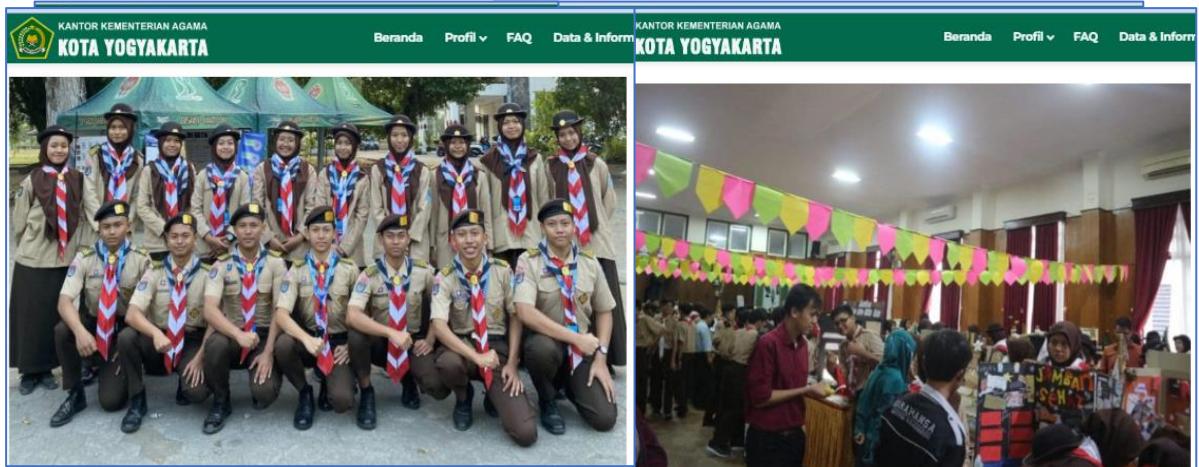
Sumber : Data diolah Seksi Dikmad (juara 1, 2 dan 3)

11. Sasaran Kegiatan 28: Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/ sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan.

Upaya yang dilakukan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 berupa:

(1) pendampingan dan bimbingan pada guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan oleh pengawas madrasah, (2) Kegiatan bimbingan dan pendampingan pelaksanaan P5PPRA pada peserta didik, (3) Penyediaan Sarana prasarana yang mendukung layanan ramah anak seperti: (a) Layanan lingkungan bersih dan nyaman, (b) Layanan Keamanan dan Ketertiban dan (c) Layanan kesehatan siswa.

Kemenag Kota Yogyakarta juga terus mendorong madrasah-madrasah untuk menjadi madrasah yang ramah anak Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak, seperti penyediaan fasilitas yang ramah anak, pelatihan guru tentang penanganan kasus kekerasan, serta kampanye anti kekerasan di lingkungan sekolah.

Gambar 1.21: Kegiatan Pramuka

Program ini merupakan implementasi dari peningkatan budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan. Gerakan ini mendorong madrasah untuk tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa, kepedulian terhadap lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan. Program ini juga mendorong partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal

12. Sasaran Kegiatan 29: Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan

Pendidikan kepramukaan bertujuan menguatkan proses pendidikan karakter di sekolah melalui penguatan pembelajaran. Membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Pendidikan Kepramukaan juga sangat relevan dengan pendidikan karakter bangsa. Karena di dalam Gerakan Pramuka merupakan lembaga yang menggunakan prinsip pendidikan dalam arti yang luas bertumpu pada belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar hidup bermasyarakat dan belajar untuk mengabdikan.

1.1.3. Kondisi Umum Tata Kelola

1. Sasaran Kegiatan 30: Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum

Kemenag Kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam memberikan layanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dalam bidang-bidang yang terkait dengan keagamaan Beberapa contohnya adalah:

- a. Hukum Keluarga: Kemenag memberikan layanan konsultasi dan mediasi dalam kasus-kasus perceraian, pernikahan, dan hak asuh anak.
- b. Hukum Waris: Kemenag membantu masyarakat dalam memahami dan melaksanakan hukum waris sesuai dengan syariat Islam.
- c. Hukum Wakaf: Kemenag memberikan sosialisasi dan edukasi tentang hukum wakaf, serta membantu masyarakat dalam mengelola wakaf secara produktif.
- d. Hukum lainnya yang berkaitan dengan keagamaan: Kemenag juga memberikan layanan dan bantuan hukum dalam kasus-kasus lain yang berkaitan dengan keagamaan, seperti sengketa tanah wakaf, sengketa kepemilikan masjid, dan lain sebagainya.

2. Sasaran Kegiatan 3.1: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai).

Untuk mencapai indeks professional ASN berkategori sedang (minimum 71), Administrasi Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta mengukur dari Penilaian Kinerja PNS tahun 2020 dan tahun 2021, sedangkan mulai tahun 2022 terdapat pola yang berbeda dari penilaian kinerja tersebut tanpa menggunakan angka maka mulai tahun tersebut tidak dapat menunjukkan prosentase pencapaiannya.

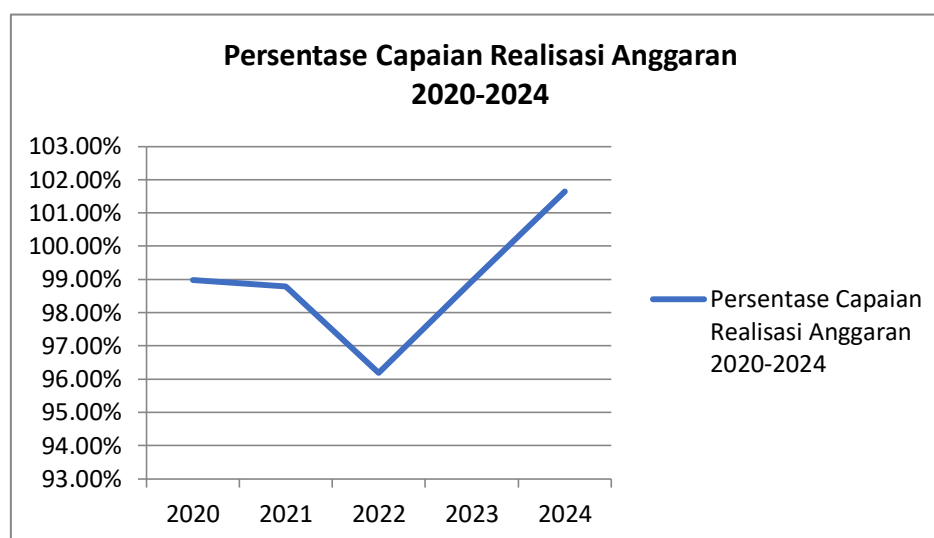
Update data dan mutasi pegawai dilakukan dengan tepat waktu untuk kenaikan gaji berkala dan kepangkatan yang semuanya dengan cara online atau system digital.

3. Sasaran Kegiatan 3.2: Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan DIPA yang dikelola pada setiap tahun telah

menyelesaikan laporan keuangan untuk dilaporkan ke KPPN dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan tersebut terdiri dari 12 laporan bulanan, 1 laporan (CaLK) semester pertama dan 1 laporan tahunan untuk masing-masing DIPA Secara rutin dan tepat waktu. Operator keuangan juga telah melakukan rekonsiliasi pelaksanaan anggaran dan menyampaikan laporan ke KPPN dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 60 laporan (12 laporan x 5 DIPA).

Grafik 2 Realisasi Anggaran Tahun 2020 sd 2024



Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta memperoleh Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran baik dengan rata2 nilai 97,32 pada tahun 2024.

4. Sasaran Kegiatan 3.3: Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel.

Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan sertifikasi tanah pemerintah, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Kantor Kementerian ATR/BPPN Kota Yogyakarta. Untuk proses sertifikasi tersebut sehingga tanah pemerintah semaksimal mungkin dilakukan penertiban dan pengamanan asset milik negara.

Tabel: 1.16
Data Inventaris Tanah yang bersertifikat

No	Lokasi	Luas Tanah	Peruntukan	Status Hukum
1	Jl DR Soepomo 591 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta	413	Rumah Dinas	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
2	Jln Kimangun Sarkoro 43A Yogyakarta, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta 55165	1663	Kantor Kemenag Kota Yogyakarta	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
3	Jl Minggiran, Suryodiningratan, Kec Mantrijeron, Yogyakarta, 55141	200	KUA Mantrijeron	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
4	Jl Cokrokusuman Baru JT II No786, Cokrodiningratan, Kec Jetis, Yogyakarta, 55233	268	KUA Jetis	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
5	Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta	240	KUA Gondomanan	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
6	Jl Ronodigdayan No28, Macanan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, 55211	159	KUA Danurejan	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
7	Jl Jayengprawiran 9 Yogyakarta, Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta 55166	243	KUA Pakualaman	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
8	Jl Imogiri Timur Giwangan, Umbulharjo Yogyakarta 55166	523	KUA Umbulharjo	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
9	Jl Panembahan Yogyakarta, Panembahan, Kraton, Yogyakarta	395	KUA Kraton	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
10	Letjen Suprpto 88 Gedongtengen, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta 55272	451	KUA Gedongtengen	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
11	Jl Tegalmulyo No23, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, 55253	347	KUA Wirobrajan	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
12	Jl Tompeyan No200A, Tegalrejo, Kec Tegalrejo, Yogyakarta 55244	400	KUA Tegalrejo	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
13	Jl Nyi Wiji Adhisoro No35, Prenggan, Kec Kotagede, Yogyakarta 55172	353	KUA Kotagede	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
14	Jalan Permadi MGII No 1767, Jl Permadi Noll/1767, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta 55151	378	KUA Mergangsan	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
15	Jalan Mendungwarah no 149 A, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 55163	909	MIN I Yogyakarta	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
16	Jalan Mendungwarah no 149 A, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 55163	447	MIN I Yogyakarta	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
17	Jalan Mendungwarah no 149 A, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 55163	589	MIN I Yogyakarta	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
18	Jalan Mendungwarah no 149 A, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 55163	945	MIN I Yogyakarta	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
19	Jalan Mendungwarah no 149 A, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 55163	296	MIN I Yogyakarta	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI
20	Jalan Mendungwarah no 149 A, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 55163	784	MIN I Yogyakarta	SHP Pemerintah RI cq Kementerian Agama RI

Sumber data Laporan SIMAK BMN tahun 2024

Ada 2 KUA yang masih menempati tanah milik sultan ground/ magersari yaitu KUA Gondokusuman dan KUA Ngampilan.

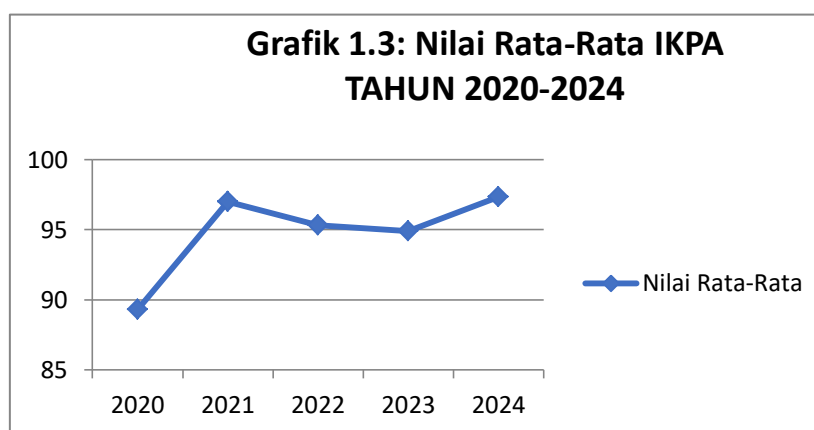
5. *Sasaran Kegiatan 34: Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi.*

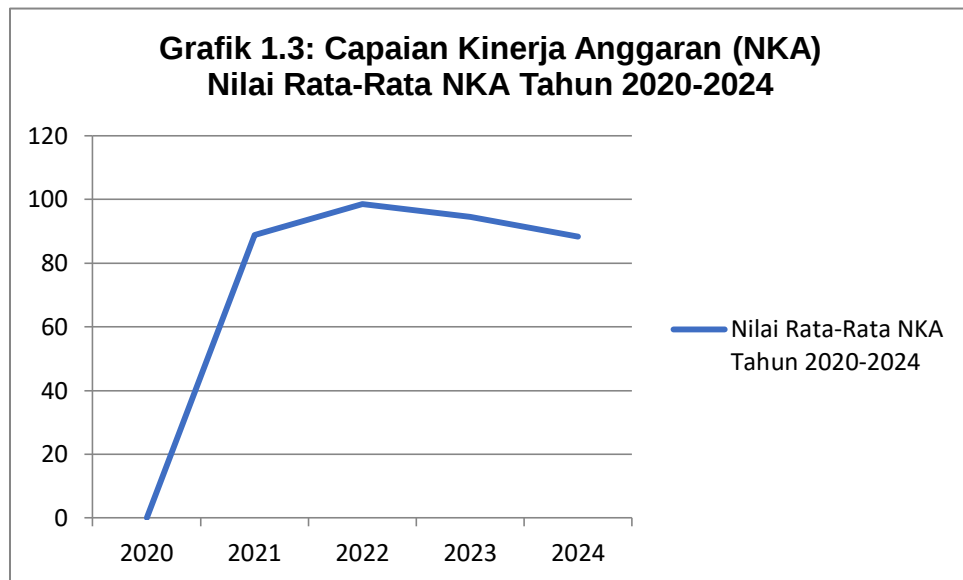
Peningkatan manajemen ini juga tercermin dari implementasi sistem pelaporan kinerja yang lebih terintegrasi Kemenag Yogyakarta aktif mendorong madrasah di bawah naungannya untuk menggunakan aplikasi seperti Sistem Informasi Kinerja dan Anggaran (SIPKA) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. Dengan penataan sistem yang lebih terukur ini, manajemen organisasi tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga lebih terarah, memungkinkan Kemenag Yogyakarta untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif.

Tabel 1.17:
Nilai Kinerja Anggaran Pada Aplikasi Online

Sistem Penilaian	Tahun Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
SIPKA	-	97,89	102,26	103,15	103,4
IKPA	89,298	96,976	95,318	94,898	97,318
NKA (Nilai Kinerja Anggaran)	-	88,842	98,598	94,582	88,39

Sumber data Diolah dari Aplikasi Omspan, SmartDJA, SIPKA





Dengan upaya bersama antara Kemenag, lembaga pendidikan, dan pihak-pihak terkait, diharapkan seluruh lembaga di lingkungan Kemenag Kota Yogyakarta dapat memiliki manajemen organisasi yang kuat dan profesional. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja lembaga, serta pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

6. *Sasaran Kegiatan 35: Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi.*

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama Kota Yogyakarta ditandai dengan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dilaksana Pada tahun 2020 Kementerian Agama Kota Yogyakarta lulus menjadi Kantor Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh KemenpanRB. Indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas tidak lepas dari komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari 6 (enam) area perubahan yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indikator-indikator dari 6 (enam) area perubahan.

Gambar 1.22: Pelantikan Pengurus ZI & Pengukuhan Agen Perubahan



Pada program zona intergritas Kemenag Kota Yogyakarta telah membentuk Tim Zona Integritas dengan periode dua tahunan. Untuk suksesnya Zona integritas dibentuk juga Agen perubahan yang mengusung agenda perubahan dan pembangunan ZI. Disamping itu Tim ZI juga berperan dalam pendampingan terhadap satker binaan (MAN dan MTsN). Selain pendampingan terhadap satker binaan Tim ZI juga berperan menerima kunjungan dan studi tiru dari satker/intansi. Tabel berikut Instansi yang melakukan studi tiru pembangunan ZI di Kemenag Kota Yogyakarta.

Tabel 1.18:
Data Studi Tiru Instansi

NO	TANGGAL	SATUAN KERJA
1.	Senin, 25 Januari 2021	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten
2.	Ahad, 24 Oktober 2021	Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi
3.	Rabu, 27 Oktober 2021	Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara
4.	Jum'at, 12 November 2021	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
5.	Kamis, 11 November 2021	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan
6.	Rabu, 24 November 2021	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta
7.	Kamis, 25 November 2021	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat
8.	Jum'at, 26 November 2021	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut
9.	Jum'at, 26 November 2021	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang
10.	Kamis, 20 Januari 2022	Kantor Kemenag Kabupaten Barito Kuala
11.	Jum'at, 25 Februari 2022	Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung
12.	Jum'at, 11 Maret 2022	Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan
13.	Jum'at, 25 Maret 2022	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah
14.	Senin, 28 Maret 2022	Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon
15.	Selasa, 29 Maret 2022	Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta
16.	Jum'at, 13 Mei 2022	Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
17.	Senin, 30 Mei 2022	Kantor Kementerian Agama Kab Hulu Sungai Selatan
18.	Kamis, 02 Juni 2022	Seksi Dikmad Kemenag Kota Bandar Lampung
19.	Selasa, 07 Juni 2022	MAN 2 Kudus
20.	Kamis, 16 Juni 2022	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna
21.	Senin, 20 Juni 2022	Kanwil Kemenag Provinsi Lampung
22.	Jumat, 15 Juli 2022	Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru Kalsel
23.	Jum'at, 5 Agustus 2022	Kantor Kementerian Agama Kab Hulu Sungai Utara
24.	Kamis, 8 September 2022	UIN Imam Bonjol Padang
25.	Jum'at, 23 September 2022	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu
26.	Kamis, 6 Oktober 2022	Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung
27.	Selasa, 22 November 2022	UIN Imam Bonjol dan IAIN Pontianak
28.	Kamis, 8 Desember 2022	Balai Diklat Keagamaan (BDK) Denpasar Bali
29.	Jum'at, 23 Desember 2022	UIN Salatiga
30.	2 Februari 2023	Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat
31.	9 Februari 2023	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan
32.	11 Mei 2023	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Surabaya, Jawa Timur
33.	16 Mei 2023	Badan POM Jakarta
34.	11 Agustus 2023	Kelompok Kerja Pengawas PAI Kabupaten Bandung
35.	25 Agustus 2023	Kemenag Kabupaten Tuban

36.	19 September 2023	Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan
37.	Senin, 29 January 2024	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara
38.	Senin, 6 Mei 2024	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM
39.	Senin, 13 Mei 2024	Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya
40.	Selasa, 11 Juni 2024	Kantor Kementerian Agama Kota Banjar Jawa Barat
41.	Kamis, 25 Juli 2024	Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Sumatera Selatan
42.	Senin, 29 Juli 2024	Kantor Kementerian Agama Kota Bau- Bau dan Buton
43.	Kamis, 12 September 2024	Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat
44.	Jum'at, 1 November 2024	Kantor Kementerian Agama Kota Metro Propinsi Lampung
45.	Rabu, 6 November 2024	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
46.	Senin, 25 November 2024	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir

7. Sasaran Kegiatan 36: Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

Upaya dalam menyelaraskan muatan rencana kerja dengan renstra dilakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi tahun berjalan dan persiapan penyusunan rencana kinerja tahun berikutnya. Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang menghadirkan, Kasubag TU beserta Koordinator Keuangan, koordinator Kepegawaian, koordinator umum, Perencana, Para Kasi dan Penyelenggara Zawa, beserta operator, para kepala satker MAN, MTsN dan MIN beserta KTU dan operator, pengurus Pokjawas, Pokjaluh dan pokjahulu, perwakilan Kepala KUA.

Keselarasan muatan Renja dengan Renstra dan kualitas perencanaan anggaran dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kuantitas pengajuan revisi DIPA. Adanya peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah akan bisa dijadikan sebagai upaya yang baik dalam meminimalisir revisi DIPA yang dilakukan pada tahun berjalan. Untuk itu maka perlu adanya perubahan sistem perencanaan anggaran yang perlu dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan Upaya yang telah dilakukan berupa (1) Penyediaan dokumen RKT, Perkin, Rencana Aksi dan program kerja setiap tahun, (2) Kegiatan koordinasi dan evaluasi mulai dari unsur pimpinan, (3) Pendampingan dan bimbingan penyusunan dokumen perencanaan bagi unit kerja (termasuk madrasah).

8. *Sasaran Kegiatan 37: Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran.*

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran, Kanwil Kementerian Agama DI Yogyakarta berpedoman pada KMA 94 Tahun 2021. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Beberapa hal informasi terkait pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana Pembangunan yang dilakukan antara lain;

- a. DIPA hasil Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja pada tahun 2024 (Tahun terakhir renstra) telah diterima hasil penyusunan RKAKL berupa DIPA yaitu: 2 DIPA MAN, 1 DIPA MTsN, 1 DIPA Setjen, 1 DIPA Pendis, 1 DIPA PHU, 1 DIPA Bimas Islam dan 1 DIPA Bimas Katholik, hal ini berkurang 2 DIPA dari awal tahun renstra yaitu: DIPA Bimas Hindu dan DIPA Bimas Buddha karena pada awalnya hanya untuk belanja pegawai dan belanja tersebut beralih pada DIPA Setjen mulai tahun 2023 berdasarkan KMA No 76 tahun 2023 tentang Integrasi Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pada Kanwil dan Kemenag Kota/Kota.
- b. Aplikasi Pendukung Perencanaan, monitoring dan evaluasi
 - 1) Seksi Bimas Islam, melakukan koordinasi penyusunan bahan perencanaan melalui aplikasi online E-planning Bimas Islam pada alamat <http://ebikemenaggoid/> yang mengakomodir semua kebutuhan operasional pada Bimas Islam dan KUA,
 - 2) Aplikasi e-Planning Kemenag pada alamat <https://e-planningkemenaggoid/> yang digunakan untuk menghitung angka dasar kebutuhan perencanaan tahun berikutnya.
 - 3) Aplikasi Sakti pada alamat <https://saktikemenkeugoid/> yang digunakan untuk melakukan perbaikan data POK Satker.
 - 4) Aplikasi Satu-DJA, pada alamat <https://satudja.kemenkeugoid/> yang

digunakan untuk mengetahui data hasil revisi anggaran.

- 5) Aplikasi Omspan, pada Alamat <https://spanintkemenkeugoid/> spanint/ untuk memantau realisasi dan penyerapan anggaran.
- 6) Aplikasi Emonev Bappenas, untuk melakukan input laporan perkembangan pelaksanaan anggaran, dan
- 7) Aplikasi SMART DJA, pada alamat <https://monevkemenkeugoid/> untuk memantau nilai kinerja anggaran yang terintegrasi pada aplikasi sakti.

Tabel 1.19:
Data Capaian Nilai IKPA Tahun 2020-2024

Satker	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
417609	91,09	96,88	96,02	95,17	97,11
417610	90,61	98,02	93,74	94,58	98,50
417611	85,51	94,76	93,33	94,10	97,21
417613	88,19	98,34	97,48	95,47	96,66
417617	91,09	96,88	96,02	95,17	97,11

Sumber data : Aplikasi Omspan

9. Sasaran Kegiatan 38: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor

Berdasarkan anggaran yang terdapat belanja modal seperti:

Gambar 1.23:
Kondisi Perkantoran Sebelum (2020) dan Sesudah direnovasi (2024)



- a. Tahun 2021, Pembangunan Gedung sumber dana SBSN di KUA, MAN 1

Yogyakarta.

- b. Tahun 2022, Pembangunan Gedung sumber dana SBSN di KUA dan Rehap Gedung Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
- c. Tahun 2023, Rehap Gedung Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan Pembangunan Gedung sumber SBSN MAN 2 Yogyakarta.
- d. Tahun 2024, Pembangunan Gedung sumber dana SBSN di KUA dan MIN 1 Yogyakarta

10. Sasaran Kegiatan 39: Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa.

Kemenag Yogyakarta telah mengimplementasikan aplikasi nasional Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk tata persuratan dan kearsipan. Aplikasi ini secara efektif menggantikan sistem manual, memungkinkan pembuatan, pengiriman, dan penyimpanan surat dinas secara elektronik. Transformasi ini telah secara dramatis mengurangi penggunaan kertas, mempercepat alur kerja, dan mempermudah pelacakan dokumen.

Berkenaan dengan kinerja panitia pengadaan yang melalui mekanisme lelang, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam hal kepanitiaan mengikuti tim pengadaan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga resiko menurunnya lelang gagal dan menurunnya sanggah dan sanggah banding bisa dimaksimalkan.

11. Sasaran Kegiatan 40: Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi

Publikasi kegiatan satuan kerja dan unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2023 mencapai 4.460 berita. Berita tersebut diposting di berbagai website dan media sosial, diantaranya; website satuan/unit kerja, website kantor kementerian agama Kota Yogyakarta, Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dan WA grup. Hal ini selaras dengan pelaksanaan program ke tiga dari Tujuh

Program Outlook Yang Disepakati pada Rakernas yaitu *memenangkan pertarungan digital*. Pada tahun 2023, telah disediakan sarana Podcast Kemenag Kota Yogyakarta sebagai sarana penyampaian informasi layanan dan kegiatan keagamaan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Gambar 1.24: Penyampaian Informasi melalui Padcast



12. Sasaran Kegiatan 41: Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi

Peningkatan kualitas data dan sistem informasi di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogyakarta pada periode 2020-2024 menunjukkan adanya transformasi digital yang signifikan, sejalan dengan program nasional Kementerian Agama. Upaya ini terlihat dari peralihan penggunaan sistem manual ke platform digital terintegrasi untuk pengelolaan data pendidikan dan kepegawaian. Salah satu contoh utamanya adalah migrasi data guru dan tenaga kependidikan (GTK) dari aplikasi SIMPATIKA ke EMIS 40. Peralihan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data GTK yang sangat penting untuk berbagai keperluan.

Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga pada akuntabilitas dan kecepatan pelayanan publik. Berdasarkan laporan, Kemenag Yogyakarta juga mengimplementasikan sistem lain, seperti aplikasi internal untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang membantu mempercepat proses surat-menyurat dan layanan bagi masyarakat. Upaya ini

didukung dengan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan literasi digital mereka.

Salah satu aspirasi masyarakat adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program-program keagamaan. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai penggunaan anggaran dan hasil-hasil yang telah dicapai. Selain itu, masyarakat berharap Kemenag dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta membuka ruang dialog yang lebih luas untuk menerima masukan dan kritik konstruktif.

Masyarakat juga mendorong Kemenag Kota Yogyakarta untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan keagamaan yang relevan dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Saya yakin, dengan semangat perbaikan dan kolaborasi, Kemenag dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan Kota Yogyakarta.

Secara umum, aspirasi masyarakat Yogyakarta sejalan dengan program-program yang telah diluncurkan oleh Kemenag. Berikut adalah poin-poin yang dapat disimpulkan dari aspirasi dan respons Kemenag berdasarkan media yang beredar di Kota Yogyakarta, antara lain:

1. **Peningkatan Pelayanan Publik:** Masyarakat menginginkan layanan yang mudah, cepat, dan transparan. Sebagai respon, Kemenag meluncurkan inovasi “SMART” (Senyum, Mudah, Amanah, Ramah dan Transparan) sebagai pelaksanaan dari kolaborasi Kemenag dan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui JSS (Jogja Smart Servis) Kota Yogyakarta.
2. **Penguatan Moderasi Beragama:** Ada harapan agar Kemenag berperan aktif dalam mencegah konflik dan menyebarkan nilai-nilai moderasi.
3. **Kualitas Pendidikan Agama:** Masyarakat berharap madrasah dapat menjadi pilihan utama dan mencetak lulusan yang berdaya saing tinggi. Selain itu, di setiap SD Negeri telah terdapat program MDT (Madrasah diniyah Ta’limiyah) yang diampu oleh penyuluh agama Islam untuk

membersamai siswa SD dalam belajar membaca Al-Quran.

Secara keseluruhan, aspirasi masyarakat di Kota Yogyakarta menuntut Kemenag untuk terus berinovasi dalam pelayanan, memperkuat peran moderasi beragama, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kemenag telah merespon melalui berbagai program inovatif yang dimiliki

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan tersebut dapat dijadikan pembelajaran bagi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk menjalankan tugasnya pada periode-periode berikutnya. Berikut merupakan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan Analisa jangka menengah berdasarkan tujuan Kementerian Agama selama periode 2020-2024;

1.2.1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah

Tujuan pertama sebagai Upaya untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang menjadi tugas dan fungsi seksi Bimbingan Masyarakat Islam.

Tabel 1.20
Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Pertama Tahun 2020-2024

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Sumber Daya Manusia yang Kompeten: memiliki SDM yang memiliki pengetahuan agama yang luas dan pengalaman dalam memberikan bimbingan ibadah	Keterbatasan Anggaran: Anggaran yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk melaksanakan semua program peningkatan kualitas ibadah secara optimal	Minat Masyarakat yang Tinggi: Masyarakat memiliki minat yang tinggi terhadap peningkatan kualitas ibadah	Radikalisme dan Intoleransi: Ancaman radikalisme dan intoleransi dapat menghambat upaya peningkatan kualitas ibadah yang inklusif
Jaringan yang Luas: memiliki jaringan dengan berbagai organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, dan instansi terkait, yang dapat mendukung pelaksanaan program peningkatan kualitas ibadah	Jangkauan Program yang Belum Merata: Program-program yang ada mungkin belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil	Perkembangan Teknologi: Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas program-program keagamaan	Perubahan Sosial: Perubahan sosial yang cepat dapat mempengaruhi cara masyarakat beribadah dan memahami agama

Program yang Beragam: telah memiliki berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah, seperti bimbingan manasik haji, penyuluhan agama, dan pelatihan imam/khatib	Kurangnya Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam program-program keagamaan masih terbatas	Kerjasama dengan Pihak Lain: Peluang kerjasama dengan organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dan pihak swasta dapat diperluas	Krisis Ekonomi: Krisis ekonomi dapat membatasi anggaran yang tersedia untuk program-program keagamaan
Dukungan Pemerintah: mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program keagamaan	Evaluasi Program yang Belum Optimal: Sistem evaluasi program belum berjalan secara optimal, sehingga sulit untuk mengukur dampak program secara akurat	Dukungan Pemerintah Pusat: Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam pengembangan program-program peningkatan kualitas ibadah	Informasi yang Tidak Benar: Maraknya informasi yang tidak benar mengenai agama di media sosial dapat menyesatkan masyarakat

Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama ke depan perlu difokuskan kepada:

1. meningkatkan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan platform digital untuk penyuluhan daring (Online);
2. revitalisasi pembinaan sumber daya manusia untuk memperkuat kegiatan dan penyuluhan pada aspek kesalehan sosial;
3. standarisasi kompetensi bagi agen penyiaran pesan keagamaan,
4. optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
5. pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

1.2.2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama

Moderasi beragama merupakan suatu konsep guna menjaga kerukunan umat beragama. Konsep tersebut tidak hanya bertujuan untuk memoderasikan agama, akan tetapi untuk memoderasikan cara mengetahui dan menerapkan ajaran agama dalam situasi di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk terutama dikalangan pendidikan. Merupakan tugas dan fungsi Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Sekretariat Jenderal, Agen Moderasi, dan FKUB.

Tabel 1.21
Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Kedua Tahun 2020-2024

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Kolaborasi Lintas Sektor: Keterlibatan berbagai unsur (Sub Bag TU, Unsur Pimpinan, Agen Moderasi, FKUB) menciptakan sinergi yang kuat	Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran dan SDM untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Dukungan Pemerintah: Adanya dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap program moderasi beragama	Radikalisme dan Intoleransi: Penyebaran paham radikal dan intoleran di media sosial dan masyarakat
Jaringan FKUB yang Aktif: FKUB sebagai forum kerukunan memiliki jaringan luas dengan tokoh agama dan masyarakat	Kurangnya Sosialisasi: Sosialisasi program moderasi beragama yang belum optimal dan terbatasnya jumlah narasumber yang mampu menyampaikan konsep moderasi beragama sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat	Perkembangan Teknologi: Pemanfaatan teknologi untuk sosialisasi dan edukasi moderasi beragama	Politik Identitas: Pemanfaatan isu agama untuk kepentingan politik yang memecah belah
Program Moderasi yang Terstruktur: Program terobosan Kepala Kemenag Kota Yogyakarta dengan program Podcast Moderasi	Potensi Konflik Internal: Potensi perbedaan pandangan antar unsur yang terlibat	Kerjasama dengan Media: Kerjasama dengan media massa untuk menyebarkan narasi moderasi beragama	Berita Hoaks dan Disinformasi: Penyebaran berita hoaks dan disinformasi yang memicu konflik antar umat beragama
Tokoh Agama yang Moderat: Keberadaan tokoh agama yang moderat dan berpengaruh di masyarakat	Pengukuran Dampak yang Sulit: Sulitnya mengukur dampak program moderasi beragama secara kuantitatif	Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kerukunan umat beragama	Perbedaan Penafsiran Agama: Perbedaan penafsiran agama yang dapat menimbulkan konflik
Adanya Agen Moderasi: Adanya agen moderasi yang sudah terlatih	Regenerasi Agen Moderasi: Belum adanya sistem yang baku dalam regenerasi agen moderasi	Adanya program dari pusat: Program dari pusat yang bisa di sinergikan dengan program daerah	Pengaruh Global: Pengaruh global yang masuk ke Indonesia dan mempengaruhi pola pikir masyarakat

Harapan besar terhadap perbaikan dalam penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama pada periode 2025-2029. Berikut terdapat beberapa harapan :



1. Pendidikan Moderasi Beragama yang Merata:

- a. Pendidikan moderasi beragama dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
- b. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada lembaga pendidikan formal, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan di masyarakat, seperti pengajian, seminar, dan diskusi.
- c. Materi pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

2. Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Masyarakat:

- a. Tokoh agama dan masyarakat dapat menjadi agen-agen moderasi yang aktif di lingkungannya masing-masing. Sehingga mereka dapat memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana hidup rukun dan toleran antar umat beragama.
- b. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dan pelatihan kepada tokoh agama dan masyarakat agar mereka dapat menjalankan peran ini dengan efektif.

3. Penggunaan Teknologi untuk Menyebarkan Narasi Moderasi:

- a. Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keagamaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan narasi moderasi beragama.
- b. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan konten-konten positif tentang kerukunan umat beragama dan menangkal informasi-informasi hoaks yang dapat memicu konflik.
- c. Adanya sistem pengawasan yang baik dalam media sosial, agar tidak ada berita hoax yang bersifat memecah belah umat beragama.

4. Dialog Antar Umat Beragama yang Intensif:

- a. Dialog antar umat beragama dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.
- b. Dialog ini tidak hanya terbatas pada pertemuan formal, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan bersama, seperti bakti sosial, olahraga, dan seni budaya.
- c. Dialog ini dapat menjadi wadah untuk saling memahami perbedaan dan

membangun kerjasama antar umat beragama.

1.2.3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;

Merupakan tugas dan fungsi Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara zawa, Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, serta unit layanan keagamaan (KUA), sebagai upaya untuk memperluas dan meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh lembaga keagamaan, dalam hal ini Kantor Kementerian Agama (Kemenag). Layanan-layanan ini mencakup berbagai aspek kehidupan beragama, seperti pengelolaan zakat dan wakaf, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta layanan syariah seperti bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga, dan sertifikasi produk halal.

Untuk memastikan bahwa semakin banyak umat beragama yang dapat memanfaatkan layanan-layanan tersebut secara mudah, cepat, dan berkualitas Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan manfaat layanan keagamaan, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan umat beragama dapat menjalankan ibadah dan memenuhi kebutuhan keagamaan mereka dengan lebih baik, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang religius dan sejahtera.

Tabel 1.22
Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Ketiga Tahun 2020-2024

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Peningkatan Kapasitas SDM: Adanya peningkatan kompetensi petugas dalam memberikan layanan keagamaan, melalui pelatihan dan bimbingan	Keterbatasan Anggaran: Anggaran yang terbatas dapat menghambat pengembangan program dan peningkatan kualitas layanan	Perkembangan Teknologi Digital: Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan	Dampak Pandemi: Pandemi COVID-19 berdampak pada penyelenggaraan haji dan umrah, serta layanan keagamaan lainnya
Optimalisasi Sistem Informasi: Penerapan teknologi informasi untuk mempermudah akses layanan, seperti pendaftaran haji online, sistem informasi zakat, dan layanan syariah digital	Jangkauan Layanan yang Belum Merata: Akses layanan belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil	Potensi Ekonomi Syariah: Potensi ekonomi syariah yang besar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan layanan zakat, wakaf, dan layanan syariah	Penyebaran Informasi Hoaks: Penyebaran informasi hoaks tentang layanan keagamaan dapat meresahkan masyarakat

Kerjasama dengan Lembaga Terkait: Jalinan kerjasama yang baik dengan lembaga zakat, bank syariah, dan instansi terkait lainnya	Kurangnya Sosialisasi: Sosialisasi tentang layanan keagamaan belum optimal, terutama kepada generasi muda	Dukungan Pemerintah: Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan layanan keagamaan	Persaingan dengan Lembaga Lain: Persaingan dengan lembaga lain yang juga memberikan layanan keagamaan
Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan keagamaan, terutama zakat, wakaf, dan haji/umrah. Meningkatnya Animo masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh sebagai bentuk kesadaran masyarakat terhadap rukun islam yang ke lima dan ketaqwaan kepada yang Kuasa mewajibkan PPIU dan PIHK meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik yang terbina dan terawasi	Proses Birokrasi yang Kompleks: Beberapa proses layanan masih dianggap rumit dan memakan waktu. Standart Pelayanan dan standart harga PPIU dan PIHK kepada masyarakat masih belum berjalan dengan baik. Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap PPIU yang illegal dan Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang PPIU dan PIHK	Minat Masyarakat yang Tinggi: Minat masyarakat yang tinggi terhadap layanan keagamaan, terutama haji dan umrah	Krisis Ekonomi: Krisis ekonomi dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta berzakat dan berwakaf
Program Inovatif: Adanya program inovatif terkait dengan layanan zakat, wakaf, dan haji/umroh	Masih adanya oknum yang kurang bertanggung jawab	Adanya peningkatan program dari pusat	Perubahan regulasi yang mendadak

Masyarakat Kota Yogyakarta memiliki harapan besar terhadap perbaikan dalam peningkatan layanan keagamaan pada periode 2025-2029 Berikut adalah beberapa harapan:

1. Akses Layanan yang Lebih Mudah dan Merata:

- Akses terhadap layanan keagamaan, seperti layanan zakat, wakaf, haji, umrah, dan layanan syariah, dapat lebih mudah dan merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta;
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus ditingkatkan untuk mempermudah pendaftaran, konsultasi, dan pembayaran layanan secara online;
- Layanan keliling atau jemput bola perlu diperluas untuk menjangkau layanan kepada masyarakat;

2. Kualitas Layanan yang Lebih Baik:

- a. Kualitas layanan keagamaan dapat terus ditingkatkan, dengan petugas yang lebih profesional, ramah, dan responsif;
 - b. Proses birokrasi harus disederhanakan dan dipercepat, agar masyarakat tidak merasa terbebani;
 - c. Sosialisasi tentang layanan keagamaan harus lebih intensif dan efektif, agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka;
- 3. Transparansi dan Akuntabilitas:**
- a. Pengelolaan layanan keagamaan, terutama zakat dan wakaf, dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel;
 - b. Informasi tentang penggunaan dana zakat dan wakaf harus mudah diakses oleh masyarakat;
 - c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dan umrah harus diperketat, untuk mencegah terjadinya penipuan dan pelanggaran;
- 4. Inovasi dan Pengembangan Layanan:**
- a. Kemenag Kota Yogyakarta dapat terus berinovasi dan mengembangkan layanan keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. Layanan konsultasi keluarga dan bimbingan perkawinan perlu diperluas dan diperkuat, untuk membantu masyarakat dalam membangun keluarga yang harmonis;
 - c. Program-program pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat dan wakaf perlu ditingkatkan;
- 5. Kerjasama dengan Berbagai Pihak:**
- a. Kemenag Kota Yogyakarta dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dengan berbagai pihak, seperti lembaga zakat, bank syariah, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah;
 - b. Kerjasama ini dapat memperkuat sinergi dan efektivitas dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat;

1.2.4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas

Merupakan tugas dan fungsi Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Madrasah dan

Lembaga Madrasah sebagai strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan;

(a) kualitas pembelajaran dan pengajaran berupa siswa dengan memiliki kompetensi minimal dalam (1) Literasi & Numerasi ; (2) Programme for International Student Assessment (PISA) dalam hal Membaca; Matematika; & Sains; (b) kualitas pemerataan akses pendidikan (Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pontren serta Pendidikan Madrasah); (c) pengelolaan dan penempatan pendidik; (d) kualitas penjaminan mutu pendidikan dan (e) kualitas mental/karakter siswa.

Tabel 1.23
Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Keempat Tahun 2020-2024

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Kurikulum Terintegrasi: Kurikulum pendidikan madrasah yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, memberikan keunggulan kompetitif bagi peserta didik	Sarana dan Prasarana yang Belum Merata: Keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa madrasah	Perkembangan Teknologi Digital: Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan akses informasi	Perubahan Kurikulum yang Cepat: Perubahan kurikulum yang cepat dan tidak terencana dapat menyulitkan madrasah dalam menyesuaikan diri
Tenaga Pendidik Berkualitas: Adanya peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan profesional	Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan anggaran untuk pengembangan program pendidikan dan peningkatan kualitas layanan	Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Lain: Kerjasama dengan lembaga pendidikan lain, baik dalam maupun luar negeri, untuk pengembangan program pendidikan	Dampak Pandemi: Dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu proses pembelajaran tatap muka
Jaringan Madrasah yang Luas: Jaringan madrasah yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, memudahkan akses peserta didik	Kurangnya Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran yang belum optimal	Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan berkualitas bagi masa depan anak-anak mereka	Persaingan dengan Lembaga Pendidikan Lain: Persaingan dengan lembaga pendidikan lain yang menawarkan program pendidikan yang lebih beragam
Dukungan dari Pemerintah: Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk bantuan operasional dan pengembangan sarana prasarana Dengan Adanya program peningkatan kualitas pendidikan yang terstruktur	Kesenjangan Kualitas Antar Madrasah: Adanya kesenjangan kualitas pendidikan antar madrasah	Adanya program dari pusat yang bisa diterapkan di daerah	Pengaruh negatif dari perkembangan teknologi

Strategi yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik madrasah di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada periode 2025-2029:

1. Pengembangan Kurikulum dan Pemanfaatan Teknologi.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kurikulum madrasah guna memperkaya pengalaman belajar siswa. Usulan ini mencakup pemanfaatan platform pembelajaran daring dan sumber daya digital untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan blended learning. Hal ini juga termasuk menyediakan akses internet yang memadai dan memberikan pelatihan penggunaan TIK kepada tenaga pendidik dan peserta didik.

2. Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Tenaga Pendidik.

Fokus kebijakan ini adalah meningkatkan kemampuan tenaga pengajar. Ini melibatkan penyelenggaraan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam penggunaan TIK dan metode pembelajaran inovatif. Selain itu, usulan ini mencakup seleksi ketat untuk tenaga pendidik baru dan memberikan pengembangan profesional berkelanjutan.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan fasilitas di madrasah. Prioritasnya adalah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana, serta memanfaatkan dana bantuan dari pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk memastikan pemerataan kualitas sarana antar madrasah.

4. Peningkatan Kerjasama dan Jaringan Madrasah.

Usulan ini berfokus pada perluasan kolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan ini meliputi menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan lain untuk mengembangkan program unggulan dan pertukaran peserta didik. Ini juga melibatkan masyarakat dan orang tua dalam kegiatan madrasah dan membangun komunikasi yang efektif untuk meningkatkan dukungan terhadap pendidikan.

5. Penguatan Manajemen Anggaran dan Daya Saing.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan meningkatkan daya saing madrasah. Usulan ini mencakup perencanaan dan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penting untuk mengembangkan program-program unggulan yang membedakan madrasah dari lembaga pendidikan lain dan mempromosikan prestasi peserta didik melalui berbagai media.

1.2.5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif;

Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel berupa Predikat opini laporan keuangan dan Nilai reformasi birokrasi.

Tabel 1.24
Analisis Capaian Kinerja pada Tujuan Kelima Tahun 2020-2024

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Jumlah ASN KEMENAG pada tahun 2024 sebesar 490 orang (PNS & PPPK) Sebagian besar pegawai yang telah memiliki kompetensi yang diharapkan	Awal tahun 2025 diperkirakan banyak pegawai yang masuk batas usia pensiun, Beban tugas beberapa pegawai yang berlebihan	Semakin majunya teknologi mempermudah penyediaan data secara murah dan cepat peraturan mengenai pejabat fungsional yang memacu pegawai untuk lebih kompeten	Penyebaran informasi melalui medsos yang cenderung memberikan stigma yang buruk pada lembaga pemerintah
Pemenuhan sarana prasarana kantor yang memadai sesuai kebutuhan	Beberapa sarana prasarana kantor yang sudah terlalu lama perlu direnovasi	Usulan anggaran ke Kanwil	Pemblokiran anggaran dari pusat
Adanya Regulasi yang mengatur tentang pemerintahan yang bersih dan melayani yaitu Pembangunan ZI dengan WBK dan WBBM	Sarana kantor yang berbasis IT belum tersedia	Beragamnya persepsi masyarakat terhadap pelayanan pada instansi Kementerian Agama, SOP pelayanan sudah ada dan terupdate	Keterlambatan pelayanan disebabkan sarana yang masih terbatas dan tidak mengikuti teknologi terkini

Strategi yang tepat untuk meningkatkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif pada periode 2025-2029 di Kantor Kementerian

Agama Kota Yogyakarta berdasarkan analisa SWOT di atas.

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai. Ini termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan bagi ASN Kemenag, fokus pada pelayanan publik, komunikasi, dan penggunaan teknologi. Selain itu, mendorong pegawai untuk mengikuti sertifikasi jabatan fungsional untuk meningkatkan profesionalisme. Rekrutmen pegawai baru yang kompeten dan berintegritas juga menjadi bagian dari kebijakan ini.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi.

Kebijakan ini fokus pada penggunaan teknologi untuk efisiensi, transparansi, dan kecepatan pelayanan. Ini meliputi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah akses data, pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi, dan pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi dan berdialog dengan masyarakat. Selain itu, usulan ini juga mencakup melengkapi kantor dengan sarana berbasis IT seperti komputer, jaringan internet, dan aplikasi pendukung lainnya.

3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor.

Usulan ini berfokus pada perbaikan fasilitas fisik untuk mendukung pelayanan yang lebih baik. Kebijakan ini mengupayakan pengadaan tanah dan bangunan kantor yang representatif dan sesuai standar pelayanan publik. Penting juga untuk memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor secara berkala.

4. Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas Pelayanan.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dicapai dengan menyusun dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelayanan, serta memperkuat pengawasan internal dan menegakkan kode etik untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas.



5. Peningkatan Komunikasi dan Kepercayaan Publik.

Kebijakan ini menitikberatkan pada pembangunan citra positif dan hubungan yang baik dengan masyarakat. Usulan ini mencakup melakukan sosialisasi masif tentang program dan layanan Kemenag, menanggapi keluhan dan masukan masyarakat secara cepat dan responsif dan melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk mengukur kualitas pelayanan. Tujuannya adalah membangun citra positif melalui pelayanan yang berkualitas dan komunikasi yang efektif.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN & CAPAIAN



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi dan Misi

Sebagai Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam menetapkan tujuan dan sasaran merujuk pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Renstra Kementerian Agama Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2025-2029 adalah:

***“Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia
Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta mendukung misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kementerian Agama yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, Pendidikan keagamaan; dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Bidang agama, Kementerian Agama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama dengan Program Prioritas Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rancangan RPJMN 2025-2029 Bidang Agama; (1) Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan, (2) Jaminan Hak Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis, (3) Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan, (4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, (5) Transformasi Layanan KUA yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif, (6) Transformasi Layanan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman, (7) Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan (8) Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif.

Bidang pendidikan, Kementerian Agama memiliki Arah Kebijakan dan

Strategi Pembangunan Rancangan RPJMN 2025-2029 dengan Pendidikan Kualitas yang merata berupa; (1) Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), (2) Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM, (3) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, (4) Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas, (5) Penguatan sistem tata kelola Pendidikan, dan (6) Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja.

Tata kelola pemerintahan, Kementerian Agama juga berkomitmen untuk memperkuat tata kelola organisasi guna mendukung pencapaian program prioritas. Dalam aspek tata kelola, berbagai langkah strategis dilakukan, termasuk implementasi manajemen talenta ASN yang mencakup peningkatan sistem merit dan penataan jabatan fungsional. Penataan kelembagaan dan proses bisnis dilakukan melalui penguatan keterbukaan informasi publik, peningkatan pengelolaan arsip, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi. Selain itu, transformasi pelayanan publik menjadi fokus utama dengan mengedepankan pelayanan berbasis elektronik (e-service), inovasi terpadu, dan pembangunan zona integritas pada satuan kerja.

2.2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta mendukung 5 (lima) tujuan Kementerian Agama dan selaras dengan tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kementerian Agama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut;

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa **(T-1)**, dengan sasaran strategisnya yaitu *Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial (SS-1)*.
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan

- keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi umat yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteology **(T-2)**, dengan sasaran strategisnya yaitu *Meningkatkan layanan keagamaan transformatif* **(SS-2)**.
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau **(T-3)**, dengan sasaran strategisnya yaitu *Meningkatnya pemerataan akses pendidikan* **(SS-3)**.
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing **(T-4)**, dengan 2 sasaran strategisnya yaitu: (a) *Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah* **(SS-4)** dan (b) *Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas* **(SS-5)**.
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital **(T-5)**, dengan sasaran strategisnya yaitu *Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel* **(SS-7)**.

2.3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025– 2029, serta mendukung pelaksanaan Asta Program Prioritas Menteri Agama Berdampak dan program utama. Kemenag Kota Yogyakarta menetapkan serangkaian sasaran kegiatan yang selaras dan terintegrasi dengan sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kementerian Agama.

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta merupakan turunan dari sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang secara hierarkis dijabarkan lebih lanjut pada level Kabupaten untuk memastikan keterpaduan perencanaan, konsistensi pelaksanaan, serta efektivitas pencapaian tujuan nasional sektor agama Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan di daerah memiliki

keterikatan strategis dengan arah kebijakan nasional Sasaran kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian program utama. Kementerian Agama dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Berdasarkan cascading Renstra Kementerian Agama, berikut ini sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 yang dikelompokkan berdasarkan sasaran strategis;

2.3.1. (SS-1) Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial

Sasaran Program pertama (SP-1) yaitu meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, merupakan tugas dan fungsi unit kerja Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam termasuk KUA dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK01	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00 2. Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS 3. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS 4. Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha 5. Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam 6. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan

2.3.2. (SS-2) Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif

Terdapat Sasaran Program kedua (SP-2) yaitu terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif.

Sasaran program tersebut merupakan tugas dan fungsi unit kerja Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Penyelenggara Zawa dan KUA dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK02	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) 2. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasarany ang mendapatkan bimbingan agama 3. Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan 4. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 5. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan 6. Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan 7. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 8. Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan 9. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional
SK03	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1. Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota
SK04	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	2. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
SK05	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	3. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
SK06	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	4. Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus; b. Lembaga penyelenggara umrah

2.3.3. (SS-3) Meningkatnya pemerataan akses pendidikan,

Terdapat Sasaran Program ketiga (SP-3) yaitu meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Sasaran program tersebut merupakan tugas dan fungsi unit kerja Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Madrasah, MIN, MTsN dan MAN (termasuk pembimas yang ada tugas dan fungsi pendidikan) dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK07	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	1. Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik 2. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 3. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana 4. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren 5. Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)
SK08	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	6. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah 7. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren

2.3.4. (SS-4)Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah

Terdapat Sasaran Program keempat (SP-4) yaitu meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran Sasaran program tersebut merupakan tugas dan fungsi Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Madrasah, MIN, MTsN dan MAN (termasuk pembimas yang ada tugas dan fungsi pendidikan) dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK09	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	1. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. literasi membaca b. numerasi 2. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas 3. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 4. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler 5. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) 6. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan 7. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran 8. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B 9. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual 10. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

		11. Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
--	--	---

2.3.5. (SS-5) Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas

Terdapat Sasaran Program kelima (SP-5) yaitu meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan merata. Sasaran program tersebut merupakan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Madrasah, MIN, MTsN dan MAN (termasuk pembimas yang ada tugas dan fungsi pendidikan) dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	1. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik 2. Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP 3. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 4. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil 5. Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil 6. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik 7. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil 8. Persentase guru yang meningkat jenjang karir 9. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir 10. Persentase peningkatan jumlah lulusan

		Pendidikan Profesi Guru (PPG) 11. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
--	--	---

2.3.6. (SS-6) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Terdapat Sasaran Program ketujuh (SP-6) yaitu meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel Sasaran program tersebut merupakan tugas dan fungsi semua unit kerja di Kemenag Kota Yogyakarta dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
SK11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Nilai Kinerja Anggaran 2. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
SK12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Nilai Pembangunan Zona Integritas di atas 75
SK13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu 3. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 4. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
SK14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Indeks Profesionalisme ASN 2. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan 3. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif 4. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
SK15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase kasus hukum yang terselesaikan 2. Persentase rekomendasi izin orang asing

SK16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
SK17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
SK18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi 2. Persentase data statistik yang dipublikasi

2.4. Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan

Perlakuan terhadap risiko adalah serangkaian strategi atau tindakan konkret yang dirancang untuk mengelola dan memitigasi risiko-risiko tersebut. Langkah- langkah ini disusun secara sistematis untuk mengurangi dampak negatif atau bahkan mencegah risiko itu terjadi. Perlakuan ini memastikan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tidak hanya menyadari risiko, tetapi juga memiliki rencana aksi yang matang untuk menghadapinya.

Tabel 2.1
Identifikasi Risiko Sasaran Kegiatan dan Perlakuannya

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko / Mitigasi	PJ Perlakuan
SK01	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1. Partisipasi pemuka Agama atau masyarakat rendah 2. Keterlibatan tidak merata antar agama sehingga rekomendasi kurang representatif 3. Dialog hanya bersifat formalitas tanpa menghasilkan rekomendasi yang substansial 4. Rekomendasi EWS yang dihasilkan tidak ditindaklanjuti oleh lembaga terkait	1. Melakukan sosialisai dan pendekatan personal ke tokoh agama dan komunitas 2. Tetapkan kouta partisipasi berdasarkan agama dan kounitas 3. Gunakan fasilitator profesional dengan kemampuan mediasi dan resolusi konflik 4. Integrasikan rekomendasi EWS kedalam kebijakan Kemenag BNPT, dan	Setjen Bimas Islam Penyuluh Agama FKUB

		5. Keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi dialog berkelanjutan	Pemda 5. Bentuk Mekanisme tindak lanjut (tim kerja lintas sektor) 6. Alokasikan anggaran khusus untuk realisasi rekomendasi	
SK02	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1. Penurunan kualitas dan profesionalisme SDM dalam memberikan layanan keagamaan 2. Resistensi atau penolakan dari kelompok masyarakat tertentu terhadap layanan bersifat inklusif 3. Layanan keagamaan kurang berdampak signifikan pada peningkatan kualitas hidup dan kerukunan Masyarakat	1. Ikut serta dalam program pelatihan/ bimbingan teknis 2. Sosialisasi dan review terhadap SOP dan Standar Pelayanan public bidang keagamaan 3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara menyeluruh dan berkala	Setjen Bimas Islam KUA Kemantren
SK03	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1. Penurunan kualitas pelayanan Jemaah haji di bidang administrasi dan teknis 2. Penurunan kualitas pelayanan Jemaah haji di bidang edukasi dan kesiapan Jemaah haji 3. Penurunan kualitas pelayanan Jemaah haji di bidang pengawasan layanan dasar di tanah suci	1. Penerapan system administrasi berlapis untuk mengurangi dan menghilangkan human error pada data vital 2. Memperbaiki kurikulum bimbingan manasik dengan penekanan pada praktik/kegiatan fisik, penguatan mental dan manajemen resiko 3. Memberikan pembekalan dan penguatan petugas haji dalam bidang advokasi dan komunikasi	Seksi PHU
SK04	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Penurunan akurasi input data Jemaah haji dalam Siskohat 2. Penurunan kualitas jaringan Siskohat dan infrastuktur IT 3. Penurunan pengawasan internal yang berdampak adanya praktik pungutan liar 4. Penurunan kualitas transparansi informasi terkait persyaratan dan masa tunggu	1. Penerapan verifikasi berlapis dan pelatihan SDM 2. Upgrade perangkat dan pemeliharaan infrastruktur IT 3. Penguatan satgas anti korupsi dan penerapan <i>Whistleblowing system</i> 4. Menyediakan pusat sarana informasi haji online dan penugasan tim informasi	Seksi PHU



SK05	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1. Penurunan efektifitas bimbingan manasik haji dalam mewujudkan kemandirian Jemaah haji 2. Rendahnya kompetensi dan kualitas pembimbing manasik haji 3. Penurunan tingkat kehadiran peserta bimbingan manasik haji	1. Penerapan kurikulum adaptif dengan focus pada praktik dan manajemen risiko 2. Pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji 3. Sosialisasi pentingnya bimbingan manasik untuk mewujudkan kemandirian Jemaah haji	Seksi PHU
SK06	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	1. Penurunan efektifitas pembinaan terhadap PIHK/ PPIU akibat keterbatasan sumber daya pembinaan 2. Penurunan kualitas pengawasan akibat minimnya intensitas pengawasan dan kurangnya akurasi dan akuntabilitas pelaporan PIHK/PPIU	1. Redesign program pembinaan dengan focus pada problem solving dan regulasi teknis 2. Peningkatan kualitas pengawasan melalui penyusunan jadwal pengawasan terstruktur dan incidental serta penguatan sanksi administrative atas pelanggaran ketentuan	Seksi PHU
SK07	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	1. Rendahnya Capaian Predikat Sangat Baik (Gagal Kualitas)	1. Penguatan Program Unggulan: Membentuk kelas/program khusus (misalnya, Excellent Class atau Bimbingan Belajar Intensif) bagi siswa berpotensi tinggi sejak dini 2. Peningkatan Kompetensi Guru: Mengadakan In-House Training (IHT) atau Workshop berkala mengenai implementasi kurikulum adaptif dan teknik penilaian berbasis kompetensi (HOTS)	Pengawas, Madsah, Seksi Pendma, Seksi PAIS, Seksi Pdpontren



SK08	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1. Sarana dan prasarana baru dibangun, tetapi tidak relevan dengan kebutuhan siswa atau kurang terawat (misalnya, laboratorium tidak memiliki alat memadai atau hotspot WiFi tidak berfungsi)	1. Benchmarking dan Inovasi Fasilitas: Melakukan studi banding ke madrasah/sekolah unggulan dan memprioritaskan pembangunan fasilitas yang inovatif dan diminati (misalnya, Green House, studio multimedia, atau fasilitas olahraga modern) 2. Kampanye dan Sosialisasi Efektif: Memanfaatkan fasilitas yang sudah ada sebagai bahan promosi (publikasi visual) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk meningkatkan daya tarik	Pengawas, Madsah, Seksi Pendma, Seksi PAIS, Seksi Pdpontren
SK09	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	1. Tidak tercapainya target peningkatan mutu dan kualitas lulusan madrasah, baik dari aspek akademik (literasi dan numerasi), karakter (keberagamaan dan moderasi beragama), maupun prestasi di bidang ekstrakurikuler	1. Peningkatan Kompetensi Guru dalam bidang literasi dan numerasi 2. Penguatan moderasi beragama 3. Pengembangan Kurikulum: 4. Mengintegrasikan materi penguatan karakter, keberagamaan, dan moderasi beragama ke dalam kurikulum pembelajaran 5. Optimalisasi Program Ekstrakurikuler 6. Membangun Budaya Positif	Pengawas, Madsah, Seksi Pendma, Seksi PAIS, Seksi Pdpontren
SK10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	1. Kegagalan dalam mencapai target peningkatan mutu dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	1. Mengadakan pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi 2. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala 3. Memberikan apresiasi kepada GTK yang berprestasi	Pengawas, Madsah, Seksi Pendma, Seksi PAIS, Seksi Pdpontren



SK11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Tidak tercapainya nilai kinerja anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan	1. Memperbaiki proses perencanaan dan penyusunan anggaran 2. Memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap penggunaan anggaran 4. Mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang menghambat penyerapan anggaran	Semua Unit kerja
SK12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Pegawai/guru terbiasa dengan metode kerja lama dan enggan menggunakan sistem baru (digitalisasi, SOP baru); Sosialisasi program Reformasi Birokrasi (RB) tidak efektif	1. Sosialisasi Berjenjang dan Workshop RB: Mengadakan sosialisasi secara rutin, menekankan manfaat RB dan ZI bagi guru/pegawai (misalnya kemudahan layanan, kepastian karir) 2. Reward and Punishment: Menerapkan sistem penghargaan bagi unit kerja/individu yang proaktif mendukung implementasi RB dan memberikan sanksi bagi yang menghambat	Semua Unit kerja
SK13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1. nilai kinerja anggaran rendah dan laporan keuangan tidak akuntabel dan belum tepat waktu	1. Memperbaiki tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran 2. Melakukan pemantauan realisasi anggaran 3. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara terstruktur 4. Meningkatkan kompetensi staf dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel	Semua Unit kerja
SK14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan	1. penempatan ASN tidak sesuai dengan kompetensi atau kebutuhan organisasi, sehingga menghambat	1. Membuat pemetaan kompetensi ASN secara rutin untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi	Semua Unit kerja



	pengembangan pegawai)	pencapaian tujuan madrasah	2. Menyusun program pelatihan yang tepat 3. Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja	
SK15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Kegagalan dalam digitalisasi arsip dan pengembangan sarana prasarana, sehingga menghambat akses informasi dan efektivitas layanan madrasah	1. Mengalokasikan dana khusus untuk mendukung proses digitalisasi dan pengembangan fasilitas kantor 2. Menyusun rencana strategis yang jelas (roadmap) untuk digitalisasi arsip 3. Memberikan pelatihan kepada staf terkait agar mampu mengelola arsip digital	Semua Unit kerja
SK16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Kurangnya pengarsipan dokumen dan penyampaian informasi yang kurang valid	1. Mengidentifikasi dan menunjuk staf yang memiliki potensi dan minat di bidang komunikasi, dokumentasi, atau teknologi informasi untuk menjadi tim inti PPID 2. Memberikan pelatihan internal secara rutin untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan 3. Mengadakan kegiatan kreatif seperti lomba jurnalistik atau videografi di kalangan siswa 4. Memanfaatkan berbagai platform media sosial 5. Melakukan benchmarking ke madrasah atau sekolah lain yang memiliki publikasi konten yang kreatif dan menarik	Semua Unit kerja

SK17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1. Input data ke sistem informasi (EMIS/SIMPATIKA/Datab ase Lokal) sering terlambat atau salah; Kurangnya verifikasi data sebelum diolah dan dipublikasi	1. Penguatan Tim Data dan Verifikasi: Membentuk dan melatih tim khusus (operator dan quality control) untuk memastikan semua input data diverifikasi berjenjang sebelum disimpan permanen 2. Standarisasi Format Data: Menyusun dan memberlakukan standar baku (SOP) untuk pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data dari setiap unit kerja	Semua Unit kerja
SK18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Kesenjangan Infrastruktur TIK, perangkat TIK (komputer, jaringan, server) tidak sesuai standar kebutuhan atau rusak dan tidak diperbaiki; Ketidakmerataan akses TIK di semua unit layanan	1. Penyusunan Masterplan TIK: Menyusun peta jalan (roadmap) pemenuhan TIK yang realistis dan berjenjang (IKSK 2), fokus pada peremajaan perangkat dan peningkatan jaringan 2. Mengalokasikan dana BOS/Bantuan secara khusus dan rutin untuk pemeliharaan/perbaikan infrastruktur TIK kritis, bukan hanya pengadaan baru	Semua Unit kerja
SK19	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	1. Tidak tercapainya nilai kinerja anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan	1. Memperbaiki proses perencanaan dan penyusunan anggaran 2. Memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap penggunaan anggaran 4. Mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang menghambat penyerapan anggaran	Semua Unit kerja

2.5. Dukungan Program Prioritas Menteri Agama

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta secara konsisten berupaya mengintegrasikan tugas pokok dan fungsinya dengan delapan program prioritas Kementerian Agama (Asta Protas). Upaya dalam mendukung implementasi masing-masing program prioritas yang selaras dengan Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja sasaran kegiatan antara lain.

1. Meningkatkan Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan

- a. Kemenag Kota Yogyakarta secara aktif melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bagi tokoh agama, lembaga agama, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan. Penguatan moderasi beragama terus menjadi bagian integral dari setiap kegiatan pembinaan umat, Penguatan literasi keagamaan yang moderat di pendidikan, rumah ibadah, dan ruang publik.
- b. Kegiatan rutin Rapat Koordinasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Yogyakarta yang dihadiri seluruh pengurus FKUB Kota Yogyakarta dari 6 Agama.
- c. Berbagai kegiatan Bimbingan Teknis Pendekatan Pembelajaran Deep Learning. Pada Kurikulum Bidang Studi Berbasis Cinta baik Guru Pendidikan Agama Islam atau guru madrasah, baik secara online maupun offline pada lembaga masing-masing.

2. Penguatan Ekoteologi

- a. Dalam bidang keagamaan;
 - 1) Kemenag Kota Yogyakarta senantiasa mengintegrasikan nilai-nilai kepedulian lingkungan dalam setiap ceramah, penyuluhan, dan materi pendidikan keagamaan Upaya peningkatan kesadaran ekoteologi terus digalakkan melalui forum-forum keagamaan dan komunitas.
 - 2) Penerapan program Gerakan penguatan ekoteologi, berupa penanaman bibit pohon bagi calon pengantin di Kota Yogyakarta.
 - 3) Penerapan program “SI KOPYAH PUTIH” Santri Kota Peduli Sampah Mampu dan Terlatih.

- b. Dalam bidang pendidikan.
 - 1) Pelaksanaan program Pendidik Merdeka yang dilaksanakan oleh pendidikan madrasah.
 - 2) Mengintegrasikan kesadaran lingkungan (ekoteologi) ke dalam kurikulum dan kegiatan madrasah, untuk merawat bumi dengan kesadaran keagamaan.
 - 3) Membuat program aksi nyata seperti penanaman pohon di lingkungan madrasah, pengelolaan sampah, dan pembelajaran tentang nilai-nilai agama dalam menjaga kelestarian alam.
- c. Dalam bidang tata kelola.
 - 1) Adanya program penanaman pohon baru pada saat penerimaan pegawai baru (PPPK dan CPNS).

3. Layanan Keagamaan Berdampak

- a. Kemenag Kota Yogyakarta menyediakan digitalisasi layanan keagamaan yang memberikan dampak kemudahan, praktis dan efisien yang dilakukan dengan digitalisasi melalui aplikasi PTSP dan JSS, penggunaan TTE dan layanan berbasis WEB.
- b. Layanan "Si Kopyah Putih" Santri kota peduli sampah mampu dan terlatih, sebagai sarana layanan pendidikan diniyah dan pondok pesantren ini menunjukkan upaya nyata dalam memberikan layanan yang lebih efisien dan berdampak luas.
- c. Program "Bedug dinakota" (Bimbingan Edukasi Keagamaan di Kemenag Kota Yogyakarta) adalah Inovasi bimbingan keagamaan Kemenag Kota Yogyakarta terhadap kaum marginal, remaja rentan dan warga binaan.
- d. Penerapan program bagi ASN Kemenag Kota Yogyakarta untuk berpartisipasi dalam gerakan zakat profesi dan wakaf tunai.

4. Mewujudkan Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi

Kemenag Kota Yogyakarta melaksanakan program ini melalui beberapa fokus utama yang dijalankan oleh Seksi Pendidikan Madrasah (Dikmad), Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS), dan Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok

Pesantren (PD Pontren)

a. Peningkatan Mutu dan Keunggulan Madrasah.

Program ini diwujudkan dengan menjadikan madrasah (RA, MI, MTs, MA) sebagai pilihan utama masyarakat karena kualitasnya yang unggul (kompetitif), inklusif, dan berbasis teknologi.

Dengan pengembangan kurikulum yang Relevan dan Berbasis Karakter, Kemenag Kota Yogyakarta mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang adaptif dan menanamkan nilai-nilai universal, yang diwujudkan melalui:

1) Penggunaan Kurikulum Berbasis Cinta Kemanusiaan (Cinta Kemanusiaan dan Penghargaan terhadap Perbedaan);

Pengembangan dan insersi (penyisipan) nilai-nilai cinta kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan ke dalam materi pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler madrasah Mengintegrasikan isu kemanusiaan dan keberagaman (Moderasi Beragama) ke dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Agama Islam (PAI), Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Pendidikan Kewarganegaraan, serta melalui kegiatan proyek berbasis sosial dan kemanusiaan.

2) Penerapan Kurikulum Merdeka (Kumer);

a) Mengadakan Workshop dan Bimbingan Teknis bagi guru untuk menyusun modul ajar dalam Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada siswa, dan berbasis proyek untuk mengembangkan potensi maksimal siswa. Memastikan kurikulum yang digunakan menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan masa depan.

b) Madrasah didorong untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara optimal Hal ini dilakukan melalui workshop dan In-House Training (IHT) bagi guru untuk menyusun modul ajar yang fleksibel, relevan, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa Madrasah mengadakan workshop peningkatan kompetensi guru terkait pengembangan modul ajar dan penerapan Kurikulum Merdeka.

b. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru;

Kemenag Kota Yogyakarta berupaya memastikan guru memiliki sertifikasi profesi untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan;

- 1) Fasilitasi Penyelesaian Program PPG (Pendidikan Profesi Guru), Kemenag Kota Yogyakarta secara intensif mengusulkan dan mendata guru madrasah dan guru PAI di sekolah umum yang belum memiliki sertifikat pendidik untuk mengikuti PPG Dalam Jabatan Selain meningkatkan kapasitas mengajar, sertifikasi ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG).
- 2) Pelatihan dan Pembinaan Rutin, mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis (Bimtek) berkala bagi guru PAI dan guru madrasah, seperti pelatihan literasi digital dan penguatan materi Moderasi Beragama dalam pembelajaran.
- 3) Verifikasi Data GTK, melakukan verifikasi data guru dan tenaga kependidikan (GTK) melalui aplikasi seperti SIAGA dan EMIS untuk memastikan keakuratan data terkait tunjangan dan sertifikasi.

c. Integrasi dan Inklusivitas;

- 1) Penyediaan Fasilitas Inklusif, mendorong satuan pendidikan/pesantren untuk menyediakan fasilitas yang mendukung satuan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus (difabel).
- 2) Penguatan Pendidikan Diniyah dan Pesantren, memastikan pesantren memiliki peran yang kuat dalam sistem pendidikan nasional, termasuk penguatan sarana prasarana serta peningkatan jumlah santri yang mendapatkan akses pendidikan berkualitas.

5. Pemberdayaan Pesantren.

Pembinaan dan fasilitasi pengembangan pondok pesantren, termasuk kemandirian ekonomi pesantren.

- a. Melalui layanan Seksi Pontren.
- b. Sejalan dengan program nasional, lembaga pondok pesantren (ponpes) di Kota Yogyakarta diusulkan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

(SPPG) yang digalang Kementerian Agama.

- c. Kegiatan pada bulan Ramadan, madrasah di Yogyakarta dianjurkan Gelar Tadarus hingga Pesantren Kilat.

6. Pemberdayaan Ekonomi Umat.

Mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat dan wakaf, serta mendukung program peningkatan kesejahteraan ekonomi umat;

- a. Kemenag Kota Yogyakarta secara terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya zakat dan wakaf untuk kesejahteraan umat.
- b. Melalui program zakat dan wakaf yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi umat berupa pemberian bantuan modal bagi UMKM, pelaksanaan pentasyarufan zakat profesi ASN yang dilakukan oleh UPZ kepada fakir miskin termasuk penjaga KUA dan Madrasah.
- c. Adanya program pemberian bantuan bagi lembaga pendidikan berupa alat peraga pendidikan dan sarana permainan bagi pendidikan usia dini serta pemberian dana operasional bagi RA.
- d. Kemenag Kota Yogyakarta menjalin Perjanjian Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta Perjanjian kerjasama ini merupakan program kerjasama dalam percepatan sertifikasi Tanah Waqaf Diharapkan dengan adanya kerjasama ini permasalahan yang dihadapi dalam program percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf bisa diselesaikan dengan cepat dan program percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf bisa berjalan lancar.

7. Pemberdayaan rumah ibadah.

Pelaksanaan umumnya terintegrasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Kemenag Kota Yogyakarta, terutama melalui seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) dan koordinasi dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) serta lembaga keagamaan lainnya;

- a. Penguatan Peran Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Umat Kemenag Kota Yogyakarta secara aktif mendorong peran masjid, yang merupakan rumah ibadah mayoritas, agar tidak hanya makmur secara jamaah,

tetapi juga memakmurkan masyarakat di sekitarnya;

- 1) Mengadakan kegiatan (Pelatihan dan Pembinaan) yang bertujuan menguatkan peran BKM (Badan Kemakmuran Masjid) dan pengurus rumah ibadah lainnya agar memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan dalam mengelola aset dan program pemberdayaan.
- 2) Pengembangan Program Sosial, dengan mendorong masjid untuk menjalankan program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pendidikan (TPA/Madrasah Diniyah), sosial (santunan anak yatim/duafa), dan kesehatan (layanan kesehatan gratis yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau sosialisasi hidup sehat).
- 3) Mendorong masjid agar menjadi lembaga yang inklusif dan melayani berbagai lapisan masyarakat.

b. Peningkatan Kapasitas Da'i/Penceramah.

Pemberdayaan rumah ibadah juga sangat terkait dengan kualitas pembinaan umat yang disampaikan di dalamnya.

- 1) Pembinaan Da'i/Da'iyah, Kemenag Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan Pembinaan Da'i/Da'iyah untuk memperkuat kompetensi penceramah.
- 2) Penguatan Moderasi Beragama, penceramah ditekankan untuk menyebarkan Moderasi Beragama dalam dakwahnya, yang mencakup indikator Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti Kekerasan, dan Akomodatif terhadap Kebudayaan Lokal.

c. Sinergi dengan Program Pemerintah Daerah.

Melalui kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penguatan infrastruktur dan kualitas sumber daya di rumah ibadah:

- 1) Peningkatan Infrastruktur: kerjasama dalam pelaksanaan program Peningkatan infrastruktur rumah ibadah dan tempat pendidikan agama.
- 2) Pemberdayaan SDM Keagamaan, adanya program pemberian insentif bagi guru TPA/TPQ dan Ustazd/ustadzah, yang mendukung keberlangsungan pendidikan agama yang sering berpusat di rumah ibadah.

d. Digitalisasi Layanan Keagamaan.

Dalam konteks pelayanan keagamaan yang lebih luas, melalui penyuluh agama, Kemenag Kota Yogyakarta melakukan transformasi layanan berbasis digital, yang pada akhirnya mendukung efisiensi operasional rumah ibadah.

8. Digitalisasi Tata Kelola

Mewujudkan layanan keagamaan yang murah, mudah, efisien, dan transparan melalui digitalisasi tata kelola.

- a. Implementasi digitalisasi layanan persuratan melalui aplikasi Si Cakap dengan TTE dan pengembangan layanan berbasis WEB yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap transformasi digital.
- b. Layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT dengan Ketersediaan data layanan pendidikan berbasis IT turut memperkuat inisiatif digitalisasi.
- c. Layanan kepegawaian dengan Aplikasi SIMPEG dan aplikasi eKinerja BKN.
- d. Penggunaan aplikasi pengelolaan anggaran yang telah tersedia seperti Sakti Omspan, Emonev Bappenas, SMART DJA dan aplikasi lainnya.
- e. Penggunaan aplikasi yang disediakan Kementerian Agama seperti Pusaka, SIPKA, Simpi, SIAPE, SIMKAH, Pengurusan INJOB, SIMAS, SIWAK, dan Layanan-layanan pendidikan.

2.6. Rumusan Pengukuran / Metadata

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2025- 2029, diperlukan mekanisme yang sistematis dan terukur untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan Indikator kinerja ini berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan oleh Kementerian Agama dan yang dapat dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Setiap pengukuran kinerja mencakup informasi lengkap mengenai variabel yang diukur, metode evaluasi, pihak penanggung jawab, serta sumber data yang digunakan Perumusan indikator kinerja yang jelas dan terperinci ini disajikan sebagai acuan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja strategis yang dicapai Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.



Tabel 2.2
Rumus Pengukuran Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
SK01	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah KUA yang melaksanakan EWS b : Jumlah Total KUA	Bimas Islam	1) Laporan Kegiatan KUA 2) Berita Acara dan Notulensi Rapat Koordinasi 3) Dokumentasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev)	1. KUA yang menyelenggarakan EWS	Tahunan
		IKSK3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	$\{ (a - b) / b \} \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah dialog di KUA yang merumuskan EWS tahun ini b : Jumlah dialog di KUA yang merumuskan EWS tahun sebelumnya	Sub Bag TU Bimas Islam Zawa	a. Laporan Kegiatan FKUB b. Laporan kegiatan dialog pembahasan EWS	Kegiatan Dialog Kerukunan Dokumen Rekomendasi EWS	Tahunan
		IKSK4	Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha	$\{ (a - b) / b \} \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah Audien Tahun Ini b : Jumlah Audien Tahun Sebelumnya	Bimas Islam	Laporan Keg MTQ, Dokumentasi Visual, Data Analitik Media Digital dan Laporan Media Monitoring	1) Audiens MTQ 2) Audiens Online 3) Audiens di Media	Tahunan
		IKSK6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah lembaga yang menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola b : Total jumlah lembaga yang menjadi target	Bimas Islam	Data induk kemenag, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Laporan Kegiatan	Lembaga yang Menerima Pembinaan Lembaga yang Menjadi Target	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
SK02	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Nilai Kinerja Berasal dari: Penilaian terhadap laporan harian, evaluasi konten digital, dan riwayat partisipasi kediklatan Kategori "Baik": Ambang batas nilai yang ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian yang spesifik Rumusnya : $(a/b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah Penyuluh yang memperoleh nilai kinerja baik b : Jumlah penyuluh agama yang ada	Sub Bag TU / Bimas Islam	Laporan Harian Penyuluh, Platform Digital, Sistem Informasi Kediklatan dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	1) Nilai Laporan Harian 2) Nilai Konten Digital 3) Nilai Partisipasi Kediklatan	Triwulan Tahunan
		IKSK2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Penyuluh Agama wajib memiliki minimal 4 kelompok sasaran yang wajib diberikan bimbingan penyuluhan $x = b / a$ sehingga rasionya menjadi 1:x Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Sub Bag TU / Bimas Islam	Laporan Kegiatan Penyuluhan, Basis Data Kelompok Sasaran dan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Tahunan
		IKSK3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a = Jumlah fasilitator binwin yang bersertifikasi b = Jumlah fasilitator yang terdaftar	Sub Bag TU / Bimas Islam	Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Data jumlah Penghulu dan petugas KUA) Data Penyuluh Agama Laporan Seksi Bimas Islam	1. Jumlah fasilitator bimwin yang bersertifikasi 2. Jumlah fasilitator yang terdaftar	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
		IKSK4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a: Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan b: Jumlah remaja usia sekolah (15-19 tahun) berdasarkan data BPS	Sub Bag TU / Bimas Islam	Data BPS untuk remaja usia sekolah Data satuan pendidikan setingkat SMA/MA Lap pelaksanaan kegiatan	Data remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan remaja usia sekolah (15-19 tahun) berdasarkan data BPS	Tahunan
		IKSK5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	keluarga muda usia perkawinan 0 - 5 tahun berdasarkan data simkah $\{(a - b) / b\} \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah layanan tahun ini b : Jumlah layanan tahun sebelumnya	Sub Bag TU / Bimas Islam	Laporan Seksi Basis Data Keluarga Sakinah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kemenag	Layanan Bimbingan Keluarga yang Disediakan pada Tahun Berjalan dan tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK6	Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a = Jumlah rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana b = Jumlah total rumah ibadah yang terdaftar	Sub Bag TU / Bimas Islam	Laporan Realisasi Bantuan Data Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Ibadah Data Statistik Rumah Ibadah Terdaftar Data Rekomendasi penerima bantuan	rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana Jumlah total rumah ibadah yang terdaftar	Tahunan
		IKSK7	Persentase masjid/ musholla bersertifikat arah kiblat	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah masjid/musholla yang telah bersertifikat arah kiblat b : jumlah total masjid/ musholla	Bimas Islam	Jumlah sertifikat yang diterbitkan, Kalibrasi arah kiblat, Laporan Seksi, Basis Data Simas	Masjid/musholla yang telah bersertifikat arah kiblat total masjid/ musholla	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
		IKSK8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	$(a/b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah kitab suci agama yang dibagi b : Jumlah total kitab suci agama	Bimas Islam Katolik	1. Laporan Bimas Islam dan Katolik 2. Data kitab suci agama		Tahunan
		IKSK9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	$(a/b) \times 100\%$ Keterangan a :	Bimas Islam Katolik	1. Laporan Bimas Islam 2. Data Bantuan buku keagamaan yang disalurkan		Tahunan
SK03	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	$(a/b) \times 100\%$ Keterangan a : Total Jemaah haji yang diberangkatkan b : Total Kuota Haji Nasional	PHU	1. Situs Web resmi Kementerian Agama RI 2. Siskohat yang dikelola Kemenag	Jumlah Calon Jemaah haji	Tahunan
SK04	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	$(a/b) \times 100$ Keterangan: a : Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh atau sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana- prasarana b : Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif	PHU	1. Situs Web resmi Kementerian Agama RI 2. Siskohat yang dikelola Kemenag	PLHUT yang memenuhi standar pelayanan dan sarana-prasarana	Tahunan
SK05	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK1	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	$(a/b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik b = Jumlah total calon jemaah haji	PHU	1. Situs Web resmi Kementerian Agama RI 2. Siskohat yang dikelola Kemenag	Jumlah calon Jemaah Haji yang memperoleh Sertifikat manasik haji setelah mengikuti kegiatan manasik haji	Tahunan
		IKSK 2	Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji		PHU			Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
SK07	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah Siswa / Santri yang Lulus dengan Predikat "Sangat Baik" b : Total Jumlah Siswa / Santri yang Lulus Tahun Ajaran yang Sama	Dikmad Pdpontren	Dokumen Kelulusan (Daftar Nilai Akhir/Ijazah), Data Base Siswa Lulus (SIMPATIKA/EMIS), Laporan Akhir Tahun	Predikat Lulusan siswa nilai 90-100: sangat baik nilai 80-89,99: baik nilai 70-79,99: cukup nilai <70: kurang	Tahunan
SK08	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif b = Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan	Dikmad Pdpontren	1. Data EMIS Kemenag (Data PDBK dan penyelenggara inklusif) 2. Data Laporan Seksi 3. Data Hasil Verifikasi Lapangan Tim Pengawasan	Jumlah Satuan Pendidikan (Madrasah, Sekolah Agama, Pesantren) yang Menyediakan Pendidikan Inklusif Total Jumlah Satuan Pendidikan di bawah naungan Kemenag	Tahunan
		IKSK2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh peningkatan sarana prasarana b = Total jumlah satuan Pendidikan di Kemenag	Dikmad Pdpontren	Data Emis, Aplikasi SIMAN, Laporan BMN, Data Inventaris, Aplikasi Sakti	satuan pendidikan yang memperoleh peningkatan sarana prasarana Jumlah satuan Pendidikan di Kemenag	Tahunan
		IKSK3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	$((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa pendaftar di madrasah pada tahun berjalan b = Jumlah siswa pendaftar di madrasah pada tahun sebelumnya	Dikmad Pdpontren	Laporan tim PPDB Data mutasi siswa Data Emis Buku Induk Siswa	Data siswa pendaftar di madrasah pada tahun berjalan Data siswa pendaftar di madrasah pada tahun sebelumnya	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
		IKSK4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/ Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/ Nava Dhammasekha)	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah siswa Kelas 1 MI/ULA/Sederajat yang memiliki ijazah RA/TK/BA b : Jumlah total siswa Kelas 1 MI/ula/Sederajat	Dikmad PdPontren	Laporan tim PPDB Data mutasi siswa Data Emis Buku Induk Siswa Buku pendaftaran Laporan tim PMB	Jumlah siswa Kelas 1 MI/ULA/Sederajat yang memiliki ijazah RA/TK/BA total siswa Kelas 1 MI/ula/Sederajat	Tahunan
		IKSK5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Total jumlah satuan pendidikan	Dikmad PdPontren	1. Data EMIS Kemenag (Data sarana prasarana kesehatan) 2. Laporan Seksi Pendidikan Madrasah (Dikmad) Kemenag Kota Yogyakarta 3. Data Hasil Supervisi/Verifikasi Lapangan terkait UKS	satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Σ Siswa Baru Program Kesetaraan (Paket A, B, C) di Pesantren yang Berstatus ATS	PdPontren	1. Data EMIS Kemenag 2. Laporan Seksi di Kemenag Kota Yogyakarta 3. Data Absensi dan Daftar Peserta Didik Program	Data Anak Tidak Sekolah (ATS) dari Dinas Pendidikan atau lembaga terkait Data peserta PPK di Pondok Pesantren	Tahunan
SK09	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan	IKSK1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk a. literasi membaca: numerasi	Rumus pengukuran: literasi a / b Keterangan: a = Jumlah total nilai peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi bidang Literasi Membaca b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi Rumus pengukuran: Numerasi a / b Keterangan: a = Jumlah total nilai peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi bidang Numerasi	Dikmad	Laporan Hasil Asesmen Nasional, Pangkalan Data Pendidikan Madrasah (PDPM), Sistem Informasi Rapor Pendidikan dan Dokumen Analisis Hasil Asesmen Madrasah	- Jumlah siswa yang mengikuti asesmen - Data pokok pendidikan (Dapodik) - Kemendikbudristek - Data Emis (Education Management Information System) untuk madrasah	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangunan	Priode Pelaporan
	akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan			b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi				
		IKSK2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan	Dikmad	1. Laporan Seksi Pendidikan Madrasah 2. Data Hasil Supervisi 3. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Pendidikan 4. Aplikasi EDM, eRKAM	satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas total satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Total jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran	Dikmad	1. data emis 2. Laporan hasil supervise akademik 3. Dokumen RPP 4. Laporan hasil observasi guru senior / kepala madrasah	satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter Jumlah total satuan pendidikan sasaran	Tahunan
		IKSK4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	menjumlahkan semua prestasi yang telah diraih siswa dalam kurun waktu satu tahun ajaran Penghitungan dapat dibedakan berdasarkan tingkatnya (kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional) untuk memberikan gambaran yang lebih detail Rumusnya : $\sum (\text{prestasi kabupaten} + \text{provinsi} + \text{Nasional} + \text{Internasional})$	Dikmad	Dokumentasi Resmi Madrasah, Catatan dan Arsip Siswa dan Basis Data madrasah	Data prestasi siswa (Jumlah piala, medali, atau sertifikat penghargaan yang diraih) Data kegiatan ekstrakurikuler	Tahunan
		IKSK5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	dihitung berdasarkan perbandingan nilai karakter siswa pada awal dan akhir periode penilaian Rumusnya : $\{ (b - a) / a \} \times 100\%$ Keterangan a : nilai rata-rata awal b : nilai rata-rata akhir	Dikmad	Laporan Pembina Pramuka, Lembar Penilaian Diri (Self-Assessment), Laporan Kegiatan Perkemahan atau Lomba Pramuka, dan Survei Karakter	Nilai karakter siswa, Nilai rata-rata	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangunan	Priode Pelaporan
		IKSK6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan b : Jumlah total perangkat kurikulum	Dikmad Pd pontren PAIS	Dokumen Perangkat Kurikulum, Laporan Kegiatan Evaluasi Kurikulum dan Data Pembinaan Guru	Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan (misalnya, RPP yang memasukkan elemen peduli lingkungan) total perangkat kurikulum yang ada	Tahunan
		IKSK7	Persentase materi ajar digital (modul, video, e- book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah materi ajar digital yang tersedia dan digunakan b : Jumlah materi ajar yang digunakan	Dikmad Pd pontren	1. Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS): Laporan penggunaan materi ajar digital 2. Dokumen Guru: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau modul ajar yang mencantumkan penggunaan materi digital 3. Laporan Internal: Data inventarisasi materi ajar digital yang dibuat atau dikurasi oleh madrasah	1. Jumlah modul digital yang digunakan 2. Jumlah video pembelajaran yang digunakan 3. Jumlah e-book yang digunakan 4. Jumlah total materi ajar (digital + non- digital)	Tahunan
		IKSK8	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah Satuan Pendidikan	Dikmad	Aplikasi BAN-PDM, EMIS, Dapodik, SIMPATIKA, SK Penetapan Akreditasi	Data akreditasi: BAN PDM dan PNF atau lembaga akreditasi resmi Data lembaga terdaftar: Dapodik (Data Pokok Pendidikan) atau EMIS untuk lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
		IKSK9	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	$(a/b) \times 100\%$ Keterangan a = Jumlah lembaga pendidikan yang menerapkan program bilingual b = Total lembaga pendidikan	Dikmad	EMIS, SIMPATIKA, Laporan Kegiatan, laporan monev pelaksanaan program bilingual	Data lembaga pendidikan yang menerapkan program bilingual Data jumlah total Lembaga pendidikan	Tahunan
		IKSK1 1	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	$(a/b) \times 100\%$ Keterangan a : Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional/ internasional b : jumlah total siswa	Dikmad Pd pontren	Dokumentasi Resmi Madrasah, Arsip Prestasi, Laporan Guru Pembina dan Sistem Informasi Madrasah	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional 2. Total jumlah siswa	Tahunan
		IKSK 12	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	$(a/b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah yang memperoleh kategori baik pada nilai pengelolaan partisipatif b = Total jumlah madrasah yang dinilai	Dikmad	Instrumen PKKM atau Evaluasi Diri Madrasah (EDM) Laporan Realisasi Program dan Anggaran Madrasah (RKAM) Dokumen Pembentukan dan Penguatan Komite Madrasah Survei atau Kuisisioner Partisipasi	1. Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh nilai pengelolaan partisipatif kategori baik 2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai	Tahunan
SK10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan	IKSK1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	$(a/b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik b = Total Jumlah Guru Aktif (PNS dan Non-PNS)	Dikmad	Data Kepegawaian, Database SIMPATIKA / EMIS Kementerian Agama (yang memuat status Sertifikasi Guru), Salinan Sertifikat Pendidik guru yang bersangkutan	Jumlah Guru Bersertifikat Pendidik Jumlah Guru Aktif di Madrasah	Tahunan
		IKSK2	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	Membandingkan rasio aktual di madrasah dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam SNP $(a : b)$ keterangan a : Jumlah Guru yang ada b : Jumlah siswa	Dikmad Sub Bag TU	Dokumen Kepegawaian, Basis Data Siswa, Laporan Kesiswaan, Surat Keputusan (SK) Guru	Jumlah guru, Jumlah Siswa	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
		IKSK3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi b = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya	Dikmad	Dokumen Kepegawaian, Laporan Kinerja, Basis Data Madrasah	Data tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi, Jumlah tenaga kependidikan	Tahunan
		IKSK4	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah Guru dengan Predikat Terampil atau Lebih Tinggi B : Jumlah Guru yang Mengikuti AKG	Dikmad PAIS	Data Kepegawaian, Database SIMPATIKA / EMIS Kementerian Agama (yang memuat status Sertifikasi Guru), Salinan Sertifikat Pendidik guru yang bersangkutan	Guru Bersertifikat Pendidik Jumlah Guru Aktif di Madrasah	Tahunan
		IKSK5	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	Dikmad	Laporan Hasil Asesmen Kompetensi Kamad (AKK), Basis Data Kepegawaian Madrasah, Surat Keputusan (SK) atau Dokumen Lain	Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil Jumlah Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	Tahunan
		IKSK6	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi	Dikmad, PAIS	Laporan kegiatan Data Raport Pendidikan Data Kepegawaian	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
		IKSK7	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil b = Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP	Pendma PAIS	Laporan hasil Asesmen Data Kepgawaian	1. Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil 2. Total pengawas yang mengikuti AKP	Tahunan
		IKSK8	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama	Pendma PAIS	Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat/Golongan, Laporan Evaluasi Kinerja Guru (EKG), Basis Data Kepegawaian Madrasah (SIMPEG), dan Sertifikat dan Dokumen Pelatihan/Sertifikasi	Data kenaikan pangkat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Simpatika	Tahunan
		IKSK9	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama	Pendma PAIS	Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat / Golongan, Laporan Evaluasi Kinerja Pengawas, Basis Data Kepegawaian (SIMPEG), dan Sertifikat dan Dokumen Pelatihan/ Sertifikasi	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK 10	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	$\{(a - b) / b\} \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG pada tahun sebelumnya	Pendma PAIS	Data Guru berdasarkan sertifikasi data kepegawaian	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun sebelumnya	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
		IKSK 11	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti	PAIS	Data permintaan guru agama dari Sekolah umum Data jumlah GPAI	Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun	Tahunan
SK11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK1	Nilai Kinerja Anggaran	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam aplikasi SMART-DJA yang menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Semua Unit Kerja	Data Omspan Aplikasi SMART DJA Aplikasi SAKTI Aplikasi Emonev Bappenas Data RPD	1. Rencana Anggaran 2. Realisasi Anggaran 3. Output 4. Outcome	Triwulan Tahunan
SK12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021	Semua Unit Kerja	Dokumen Laporan Kinerja yang telah disahkan dan disampaikan (misalnya LKjIP), Laporan Hasil Review Inspektorat Jenderal/ Pengawas terhadap kualitas laporan, Surat Tanda Terima Laporan dari instansi atasan	Memenuhi kriteria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021	Triwulan Tahunan
		IKSK2	Nilai Pembangunan Zona Integritas di atas 75	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB	Semua Unit Kerja	PMPZI Eviden Pemenuhan Eviden Pengungkit	1. Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) 2. Nilai Komponen Hasil 3. Hasil Survei IPAK dan IPKP 4. Nilai SAKIP	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
							5. Prosentase penyelesaian hasil pengawasan 6. Kepatuhan pelaporan LHKAN 7. Kualitas sarana layanan publik	
SK13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	IKPA dihitung secara otomatis oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi OMSPAN	Semua Unit Kerja	Aplikasi SAKTI, Aplikasi Omspan, LPj Bendahara DIPA, EDM, eRKAM, Aplikasi Smart DJA, Aplikasi Emonev Bappenas	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran, 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran, 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
		IKSK1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan a = Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti (sesuai kriteria penyelesaian) b = Jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti	Semua Unit Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Rencana Tindak Lanjut (RTL), Dokumen Bukti Tindak Lanjut Sistem Informasi Manajemen	Temuan pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	Tahunan
		IKSK3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah satuan kerja yang menyusun laporan keuangan semester I dan II sesuai standar dan tepat waktu b = Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun laporan keuangan	Semua Unit Kerja	Dokumen Laporan Keuangan, Hasil Audit Aplikasi Keuangan (SAKTI, Omspan, Gaji Web) Data Capaian Output	Laporan Keuangan Semester I & II	Semester Tahunan
		IKSK4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja	Semua Unit Kerja	SK Penetapan Laporan Kegiatan Aplikasi PIPK	1 Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2 Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
		IKSK5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN	Semua Unit Kerja	Aplikasi Siman, Laporan BMN, Berita Acara Rekonsiliasi, Aplikasi Sakti,	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN	Tahunan
SK14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN = $(A + B + C + D) / 4$ A = Nilai Kompetensi (dari uji kompetensi atau pelatihan fungsional) B = Nilai Kualifikasi (tingkat pendidikan sesuai jabatan) C = Nilai Kinerja (berdasarkan SKP dan penilaian atasan) D = Nilai Disiplin (absensi, pelanggaran, kepatuhan administratif)	Semua Unit Kerja	Sistem Penilaian atau Asesmen seperti Asesmen Kompetensi Guru (AKG), Asesmen Kompetensi Pegawai (AKP), Laporan Evaluasi Kinerja (SKP), Dokumen Kepegawaian dan Sertifikasi, Aplikasi Kepegawaian (SIMPEG), Aplikasi My ASN, Aplikasi Pusaka,	- Kompetensi (dari uji kompetensi atau pelatihan fungsional) - Kualifikasi (tingkat pendidikan sesuai jabatan) - Nilai Kinerja (berdasarkan SKP dan penilaian atasan) - Nilai Disiplin (absensi, pelanggaran, kepatuhan administratif)	Tahunan
		IKSK2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb	Semua Unit Kerja	Data Anjab & ABK Data Mutasi Pegawai Data ASN Aplikasi SIMPEG Daftar Urut Kepangkatan	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan	Tahunan
		IKSK3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag	Semua Unit kerja	SK Tim Seleksi, Data Agen Perubahan SK pegawai Teladan, Piagam penghargaan	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
SK15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum	Semua Unit kerja	Laporan Kasus hukum Laporan TLHP kasus Data Kasus yang terjadi dan melibatkan Tugas dan fungsi Kemenag	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum	Tahunan
		IKSK2	Persentase rekomendasi izin orang asing	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan b. Jumlah rekomendasi izin orang asing	Semua Unit kerja	Data Surat keluar, Laporan surat rekom Orang asing	1. Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) 2. Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS) 3. Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP) 4. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 5. Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA 6. Rekomendasi Izin Tinggal Dinas 7. Izin Penelitian 8. Izin Studi 9. Izin Penelitian 10. Izin Studi	Tahunan
SK16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan tersedia dalam sistem digital yang dapat diakses b = Jumlah total arsip yang harus didigitalisasi dalam periode tertentu	Semua Unit kerja	Sistem Manajemen Arsip Digital, Aplikasi Srikandi, Aplikasi Ceria, Laporan Kearsipan, Layanan administrasi perkantoran, Aplikasi BSrE	1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya: arsip, SRIKANDI)	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Priode Pelaporan
		IKSK2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah pengembangan sarpras yang sesuai roadmap b = Total kegiatan pengembangan sarpras dalam periode tertentu	Semua Unit kerja	Dokumen Roadmap, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Proyek, Aplikasi SIRUP, Inventaris Barang, Aplikasi SIMAN, Inaproc, Aplikasi Sakti	Data sarana prasarana Laporan BMN sarana dan prasarana yang dikembangkan sesuai roadmap	Tahunan
SK17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Menggunakan instrumen dari Biro Humas Data dan Informasi	Semua Unit kerja	Aplikasi PPID, Web Kantor, Media Sosial, SK Tim PPID, PPIDJatimkemenaggo	1. Kebijakan dan Regulasi 2. Struktur Organisasi dan SDM PPID 3. Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik 4. Layanan Informasi Publik Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi 6. Monitoring dan Evaluasi	Tahunan
SK17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	$\{(a - b) / b\} \times 100\%$ a = Jumlah konten keagamaan & pendidikan yang dipublikasi tahun berjalan b = Jumlah konten keagamaan & pendidikan yang dipublikasi tahun sebelumnya	Semua Unit kerja	Laporan Statistik Platform Inventaris Konten, Laporan Tim Media Media Sosial	konten yang dipublikasikan pada tahun berjalan dan 5. tahun lalu	Tahunan
SK18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK1	Persentase data statistik yang dipublikasi	$((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	Semua Unit kerja	Data Humas Data Emis Data Siswa Profile Madrasah	data statistik yang dipublikasi	Tahunan

BAB III

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN



TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Berdasarkan penjelasan Pedoman Penyusunan RENSTRA Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025 – 2029 bahwa Target kinerja menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Penetapan target harus relevan dengan indikator kerjanya, logis, dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Target kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta merupakan bagian dari target satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercermin dari sasaran strategis dan indikator kinerja serta alokasi anggaran yang tersedia untuk pencapaiannya. Dokumen perencanaan masing-masing unit kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta merupakan gambaran strategi pencapaian target dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi pada setiap tahun anggaran. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja yaitu: a) program dan kegiatan, b) sasaran program/kegiatan, c) indikator kinerja, dan d) alokasi anggaran dalam implementasi kegiatan.

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target Kinerja Renstra 2025-2029

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target	Unit kerja	Priode Pelaporan
SK01	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	21,43	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	16,67	Sub Bag TU, Bimas Islam	Tahunan



		IKSK4	Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa DharmaGita/Swayamvara Tripitaka Gatha	Persen	9,38	TU, Bimas Islam, Katolik	Tahunan
		IKSK6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	32,12	TU, Bimas Islam, Katolik	Tahunan
SK02	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	89,66	TU, Bimas Islam, Katolik	Triwulan, Tahunan
		IKSK2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	100,0	TU, Bimas Islam, Katolik	Tahunan
		IKSK3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	74,29	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	56,4	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	13,5	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK6	Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	14,7	TU, Bimas Islam, Katolik	Tahunan
		IKSK7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	31,58	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persen	1	Bimas Islam, Katolik	Tahunan
		IKSK9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	5	Bimas Islam, Katolik	Tahunan
		IKSK10	Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan	Persen	100	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	67,86	TU, Bimas Islam, Katolik	Tahunan



		IKSK12	Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	Persen	90,16	Zawa	Tahunan
		IKSK13	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	Persen	83,33	Zawa	Tahunan
		IKSK14	Presentase Sertifikat Tanah Wakaf yang diterbitkan	Persen	83,33	Zawa	Tahunan
SK07	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	100	DikMad, Pontren	Tahunan
SK08	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	27,78	DikMad, Pontren	Tahunan
		IKSK2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	38,89	DikMad, Pontren	Tahunan
		IKSK3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persen	10,4	DikMad, Pontren	Tahunan
		IKSK4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	Persen	100	DikMad, Pontren	Tahunan
		IKSK5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah/pesantren	Persen	65,66	DikMad, Pontren	Tahunan
		IKSK6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada	Jumlah	0	Pontren	Tahunan



SK09	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	IKSK1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:				
			a literasi membaca	Persen	72	DikMad, Pontren	Tahunan
			b numerasi	Persen	67	DikMad, Pontren	Tahunan
		IKSK2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	100	DikMad	Tahunan
		IKSK3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	100	DikMad	Tahunan
		IKSK4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	51	DikMad, Pontren, Pais	Tahunan
		IKSK5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	80	DikMad, Pontren, Pais	Tahunan
		IKSK6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	58,06	DikMad	Tahunan
		IKSK7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	58,06	DikMad, Pontren	Tahunan
		IKSK 8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	55,6	Dikmad	Tahunan
		IKSK9	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	16,67	DikMad	Tahunan
		IKSK10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,32	DikMad	Tahunan
		IKSK11	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	58,06	DikMad	Tahunan
		IKSK12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran		87,5	DikMad	Tahunan



SK10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	60,73	DikMad, PAIS	Tahunan
		IKSK2	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	1 RA (62 : 612) 2 MI (81 : 1005) 3 MTs (254 : 3277) 4 MA (311 : 3179)	DikMad	Tahunan
		IKSK3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	100	DikMad, PAIS	Tahunan
		IKSK4	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	65,11	DikMad, PAIS	Tahunan
		IKSK5	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	100	DikMad, PAIS	Tahunan
		IKSK6	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	59,88	DikMad, PAIS	Tahunan
		IKSK7	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	Persen	100	DikMad, PAIS	Tahunan
		IKSK8	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	57,06	PAIS	Tahunan
		IKSK9	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen		Sub Bag TU	Tahunan
		IKSK10	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	39,8	Sub Bag TU	Tahunan
		IKSK11	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	88,89	Semua Unit Kerja	Tahunan
SK11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	95	Subag TU	Triwulan Tahunan



SK12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	100	Subag TU	Tahunan
		IKSK2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	4	Subag TU	Semester
SK13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	95	Subag TU	Tahunan
		IKSK2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	80,00	Subag TU	Tahunan
		IKSK3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	16,00	Subag TU	Tahunan
		IKSK4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	75,00	Subag TU	Tahunan
		IKSK5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	100	Subag TU	Tahunan
SK14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK1	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	80	Subag TU	Tahunan
		IKSK2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	100	Subag TU	Tahunan
		IKSK3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Persen	25	Subag TU	Tahunan
SK15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	90	Subag TU	Tahunan
		IKSK2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	100	Subag TU	Tahunan
SK16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	100	Subag TU	Triwulana n
		IKSK2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	85	Subag TU	Tahunan
SK17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Nilai	92	Subag TU	Tahunan

		IKSK2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	44,56	Subag TU	Tahunan
SK18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	7,5	Subag TU	Tahunan
		IKSK2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Nilai	100	Subag TU	Tahunan

3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Langsung Dalam Negeri dan Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta 2025- 2029 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional Adapun indikasi kebutuhan pendanaan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan)

Kode	Program dan Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
SEKJEND 417609						
5620	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga & Masyarakat	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2099	Layanan Manajemen SDM Internal	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2100	Layanan BMN & Perkantoran	10.315.321	10.315.321	10.315.321	10.315.321	10.315.321
2101	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2102	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
2103	Layanan Umum & Perkantoran	1.090.332	1.090.332	1.090.332	1.090.332	1.090.332
2106	Layanan Hubungan Masyarakat dan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Informasi					
6708	Layanan Perkantoran	30.119.571	30.119.571	30.119.571	30.119.571	30.119.571
JUMLAH			41.690.674	41.690.674	41.690.674	41.690.674
BIMAS ISLAM 417610						
2104	Layanan Nikah dan Rujuk	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
2125	Program Dukungan Manajemen	986.229	986.229	986.229	986.229	986.229
JUMLAH			1.231.429	1.231.429	1.231.429	1.231.429
PENDIS 417611						
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	473.536	473.536	473.536	473.536	473.536
2135	Layanan Dukungan Manajemen Internal	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
JUMLAH		742.536	742.536	742.536	742.536	742.536
KATHOLIK 417613						
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	197.775	197.775	197.775	197.775	197.775
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	720.556	720.556	720.556	720.556	720.556
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Katolik	47.567	47.567	47.567	47.567	47.567
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Katolik	76.912	76.912	76.912	76.912	76.912
JUMLAH		1.042.810	1.042.810	1.042.810	1.042.810	1.042.810
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2026		44.707.449	44.707.449	44.707.449	44.707.449	44.707.449

Pendanaan yang bersumber dari partisipasi masyarakat atau Komite Madrasah merupakan komponen penting dalam mendukung peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Yogyakarta yang tidak sepenuhnya tertampung dalam APBN (Rupiah Murni dan SBSN). Dana ini bersifat sumbangan atau bantuan yang diberikan secara sukarela, bukan pungutan yang bersifat wajib atau mengikat Penggalangan dan penggunaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan dana Komite Madrasah diatur Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah yaitu Pasal 11 ayat (1) menyatakan Komite Madrasah dapat menerima bantuan yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, badan usaha, dan/atau lembaga nonpemerintah Komite Madrasah dapat menerima Sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala Madrasah Dan

juga Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis), Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana dan Sumber Daya Pendidikan oleh Komite Madrasah (sebagai contoh, dapat merujuk pada Kepdirjen Pendis Nomor 3601 Tahun 2024 atau peraturan terbaru yang relevan) yaitu Juknis ini mengatur secara rinci mengenai tata cara penggalangan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana komite.

Dana partisipasi masyarakat yang dikelola oleh Komite Madrasah harus ditujukan untuk membiayai operasional, program, dan/atau kegiatan pada Madrasah yang tidak dapat teranggarkan melalui APBN dan/atau APBD. Penggunaan dana ini, antara lain, dapat mencakup: (1) Pembiayaan kegiatan operasional rutin Madrasah yang belum teranggarkan memadai (misalnya, internet di luar batas minimal yang ditanggung APBN). (2) Pembiayaan gaji guru dan tenaga kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) sebagai penunjang kualitas layanan madrasah. (3) Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Madrasah, seperti: Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan (pelatihan, workshop dan pengembangan diri GTK), Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler unggulan, keagamaan, atau riset, Pengembangan sistem informasi atau teknologi Madrasah. (4) Pengembangan sarana dan prasarana yang mendesak untuk menunjang pembelajaran dan pelayanan Pihak Pengelola dan Mekanisme Pertanggungjawaban.

Pihak Pengelola Utama merupakan Pihak yang bertanggung jawab penuh dalam penggalangan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana partisipasi masyarakat adalah Komite Madrasah. Komite Madrasah dipimpin oleh Ketua Komite dan didukung oleh jajaran pengurus Menurut beberapa regulasi, hasil penggalangan dana wajib dibukukan bersama antara Komite Madrasah dan Madrasah, atau dikelola langsung oleh Komite dengan mekanisme persetujuan yang ketat. Mekanisme Penggunaan dan Persetujuan: Penggunaan Dana Komite oleh Madrasah wajib: (1) Mendapat persetujuan dari Komite Madrasah melalui mekanisme rapat atau kesepakatan tertulis. (2) Digunakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang telah disetujui bersama oleh Madrasah dan Komite Pertanggungjawaban: Baik madrasah maupun pengurus Komite wajib membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan atas



penggunaan Dana Komite secara transparan dan akuntabel. Laporan ini harus mencakup bukti- bukti pengeluaran dan disosialisasikan kepada orang tua/wali peserta didik dan masyarakat Dalam Renstra Tahun 2025-2029, kerangka pendanaan dari partisipasi masyarakat ini harus secara jelas memuat program prioritas yang akan didukung, mekanisme penggalangan yang tidak memberatkan (bersifat sukarela), dan alur pelaporan yang menjamin akuntabilitas kepada seluruh stakeholder madrasah dimuat dalam petunjuk teknis masing-masing madrasah sesuai peraturan yang ada.

BAB IV

PENUTUP





PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah panduan operasional untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia. Dokumen ini disusun untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama, layanan, pendidikan, dan pembinaan keagamaan di Kota Yogyakarta.

Tujuan strategis yang ingin dicapai adalah:

1. Mewujudkan kerukunan umat beragama
2. Meningkatkan layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak
3. Memperluas akses yang terintegrasi dan berkualitas
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemenag Kota Yogyakarta akan melaksanakan empat arah kebijakan utama: Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama, Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, dan Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Renstra. Ini mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik untuk memastikan seluruh target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Rencana strategis (Renstra) ini disusun untuk memberikan arah pengembangan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada periode 2025-2029. Renstra ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan program kerja tahunan (RKT), yang akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan arah pembangunan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada periode 2025-2029. Dengan demikian diharapkan program kerja dan anggaran tahunan ini dapat disusun secara koheren untuk mewujudkan dan mendukung tercapainya tujuan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Berdasarkan analisis kondisi umum dan tantangan yang dihadapi, berikut adalah beberapa saran untuk pelaksanaan Renstra 2025-2029:

1. Penguatan Pelayanan Keagamaan: Peningkatan kualitas layanan keagamaan





- dapat ditingkatkan melalui transformasi layanan KUA yang lebih berkualitas, merata, dan inklusif
2. Peningkatan Moderasi Beragama: Diperlukan sosialisasi program moderasi beragama yang lebih optimal untuk mengatasi isu-isu seperti intoleransi dan radikalisme. Ini termasuk pemanfaatan teknologi untuk edukasi dan pengembangan sistem baku untuk regenerasi agen moderasi.
 3. Peningkatan Kualitas SDM: Penting untuk terus melakukan seleksi ketat serta memberikan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan bagi tenaga pendidik dan seluruh pegawai.
 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana kantor berbasis IT perlu terus diupayakan untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan.
 5. Perencanaan dan Pendanaan: Diperlukan pengalokasian anggaran yang memadai, terutama untuk program-program yang memiliki dampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pelayanan.
 6. Sinergi dan Keterlibatan Publik: Memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengawasan serta evaluasi program pendidikan dan keagamaan.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Yogyakarta,

^

H. Ahmad Shidqi

LAMPIRAN





MATRIK TARGET RENSTRA 2025-2029
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Base line	Target					Unit kerja	Priode Pelaporan
						2025	2026	2027	2028	2029		
SK.01	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK.1	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	N/A	14.29	21.43	21.43	21.43	21.43	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	5	33	33.33	25.00	20.00	16.67	Sub Bag TU, Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha	Persen	N/A	18.58	11.54	10.71	10.00	9.38	Sub Bag TU, Bimas Islam, Katolik	Tahunan
		IKSK.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	N/A	21.41	23.55	25.70	27.84	32.12	Sub Bag TU, Bimas Islam, Katolik	Tahunan
SK.02	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	N/A	14.29	21.43	21.43	21.43	21.43	Sub Bag TU, Bimas Islam, Katolik	Tahunan
		IKSK.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	N/A	33	33.33	25.00	20.00	16.67	Sub Bag TU, Bimas Islam, Katolik	Tahunan
		IKSK.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	N/A	18.58	11.54	10.71	10.00	9.38	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	N/A	21.41	23.55	25.70	27.84	32.12	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	N/A	14.29	21.43	21.43	21.43	21.43	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.6	Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	N/A	33	33.33	25.00	20.00	16.67	TU, Bimas Islam, Katolik	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Base line	Target					Unit kerja	Periode Pelaporan
						2025	2026	2027	2028	2029		
		IKSK.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	N/A	21.47	24.21	26.32	28.95	31.58	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persen	N/A	1	1	1	1	1	Bimas Islam, Katolik	Tahunan
		IKSK.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	N/A	1	2	3	4	5	Bimas Islam, Katolik	Tahunan
		IKSK.10	Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Bimas Islam	Tahunan
		IKSK.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	53.57	53.57	57.14	60.71	64.29	67.86	Subbag TU, Bimas Islam, Zawa	Tahunan
		IKSK.12	Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	Persen	N/A	89.74	90.91	90	90.91	90.16	Zawa	Tahunan
		IKSK.13	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	Persen	N/A	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	Zawa	Tahunan
		IKSK.14	Presentase Sertifikat Tanah Wakaf yang diterbitkan	Persen	N/A	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	Zawa	Tahunan
SK.03	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK.1	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	N/A						PHU	Tahunan
SK.04	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	N/A						PHU	Tahunan
		IKSK.2	Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	Persen							PHU	Tahunan
SK.05	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK.1	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	N/A						PHU	Tahunan
SK.06	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Dikmad, Pontren	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Base line	Target					Unit kerja	Periode Pelaporan
						2025	2026	2027	2028	2029		
SK.06	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Dikmad, Pontren	Tahunan
SK.07	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	556	556	11.11	16.67	22.22	27.78	Dikmad, Pontren	Tahunan
		IKSK.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	11.11	11.11	22.22	27.78	33.33	38.89	Dikmad, Pontren	Tahunan
		IKSK.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persen	N/A	2.54	10.8	10.8	10.6	1.04	Dikmad, Pontren	Tahunan
		IKSK.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama Widyalya/Nava Dhammasekha)	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Dikmad, Pontren	Tahunan
		IKSK.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	N/A	54.55	57.32	60.10	62.88	65.66	Dikmad, Pontren	Tahunan
		IKSK.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada Pesantren	Jumlah	N/A	75	75	75	0	0	Pontren	Tahunan

[illegible]



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Base line	Target					Unit kerja	Periode Pelaporan
						2025	2026	2027	2028	2029		
		IKSK.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	N/A	008	0.13	0.19	0.26	0.32	Dikmad	Tahunan
		IKSK.11	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	N/A	58.06	58.06	58.06	58.06	58.06	Dikmad	Tahunan
		IKSK.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	N/A	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	Dikmad	Tahunan
SK.09	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	N/A	56.50	57.91	58.90	60.03	60.73	Dikmad, PAIS	Tahunan
		IKSK.2	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	N/A	RA 62:568 MI: 81:977 MTs : 254:3250 MA: 311:3164					Dikmad	Tahunan
		IKSK.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Dikmad, PAIS	Tahunan
		IKSK.4	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	59.57	75.39	76.26	77.11	77.92	65.11	Dikmad, PAIS	Tahunan
		IKSK.5	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	N/A	70	100	100	100	100	Dikmad, PAIS	Tahunan
		IKSK.6	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	N/A	35.33	54.54	55.04	55.29	59.88	Dikmad, PAIS	Tahunan



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Base line	Target					Unit kerja	Periode Pelaporan
						2025	2026	2027	2028	2029		
		IKSK.7	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Dikmad, PAIS	Tahunan
		IKSK.8	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	49.94	55.65	56.36	64.97	57.06	PAIS	Tahunan
		IKSK.9	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	0	83.33	83.33	0	0	Subbag TU	Tahunan
		IKSK.10	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	N/A	15.84	9.58	6.63	5.23	3.98	Subbag TU	Tahunan
		IKSK.11	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	N/A	50	53.33	61.11	81.82	88.89	PAIS, Subbag TU	Tahunan
SK.10	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	N/A	95	95	95	95	95	Sub Bag TU	Tahunan
SK.11	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Sub Bag TU	Tahunan
		IKSK.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	2	3	3	4	4	4	Semua Unit Kerja	Tahunan
SK.12	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	N/A	95	95	95	95	95	Subbag TU	Triwulanan Tahunan
		IKSK.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	N/A	80	80	80	80	80	Subbag TU	Tahunan
		IKSK.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	N/A	20	16	16	16	16	Subbag TU	Semester



Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Base line	Target					Unit kerja	Periode Pelaporan
						2025	2026	2027	2028	2029		
		IKSK.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	N/A	50	42.86	50	60	75	Subbag TU	Tahunan
		IKSK.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	N/A	100	100	100	100	100	Subbag TU	Tahunan
SK.13	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK.1	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	72	72	75	77	78	80	Subbag TU	Tahunan
		IKSK.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	100	100	100	100	100	100	Subbag TU	Tahunan
		IKSK.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Persen	N/A	6	12	15	20	25	Subbag TU	Tahunan
SK.14	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	90	90	90	90	90	90	Subbag TU	Tahunan
		IKSK.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	100	100	100	100	100	100	Subbag TU	Tahunan
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	N/A	100	94.12	100	100	100	Semua unit kerja	Tahunan
		IKSK.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	N/A	80	85	85	85	85	Subbag TU	Tahunan
SK.16	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Nilai	N/A	78	81	85	89	92	Subbag TU	Tahunan
		IKSK.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	N/A	44.51	35.97	39.11	41.96	44.56	Subbag TU	Triwulanan , Tahunan

